

**1ANALISIS UPAYA VIETNAM MEMENGARUHI TIONGKOK DALAM
PENYELESAIAN MASALAH TERKAIT WILAYAH LAUT TIONGKOK
SELATAN**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

BUSTAKANO MASHUDA IBLU

18323196

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

**ANALISIS UPAYA VIETNAM MEMENGARUHI TIONGKOK DALAM
PENYELESAIAN MASALAH TERKAIT WILAYAH LAUT TIONGKOK
SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

BUSTAKANO MASHUDA IBLU

18323196

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS UPAYA VIETNAM MEMENGARUHI TIONGKOK DALAM
PENYELESAIAN MASALAH TERKAIT WILAYAH LAUT TIONGKOK SELATAN
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal,



Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 3 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 31 Juli 2025



Bustakano Mashuda Iblu

Surat Pernyataan Integritas Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bustakano Mashuda Iblu

Tempat dan Tanggal Lahir . Jakarta,14, januari, 2000

Alamat : KOMP, PMI, JL Kelud n03.

NIM : 18323196

Program Studi : Hubungan internasional

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

- I. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya. ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.



Bustakano Mashuda Iblu

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Cakupan Penelitian.....	14
1.5 Tinjauan Pustaka.....	15
1.6 Kerangka Pemikiran.....	19
1.7 Argumen Sementara.....	24
1.8 Metode Penelitian.....	26
1.8.1 Jenis Penelitian.....	26
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	27
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	28
1.8.4 Proses Penelitian.....	28
1.9 Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II HUBUNGAN TIONGKOK-VIETNAM DAN DINAMIKA SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN.....	22
2.1. Hubungan Tiongkok-Vietnam.....	23
2.2. Sengketa Laut Tiongkok Selatan.....	28
2.2.1. Sejarah Sengketa Laut Tiongkok Selatan.....	29
2.2.2. Perkembangan Sengketa Laut Tiongkok Selatan.....	31
BAB III UPAYA VIETNAM DALAM MENGHADAPI TIONGKOK DI TENGAH SENKETA LAUT TIONGKOK SELATAN.....	40
3.1. Strategi Tidak Memihak Vietnam Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan.....	40
3.2. Strategi Meminimalkan Resiko Vietnam Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan.....	46
3.3. Strategi Oposisi Hegemoni Vietnam Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan.....	51
3.4. Strategi Adaptasi Terhadap Ketidakpastian Vietnam Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan.....	55
BAB IV PENUTUP.....	59
4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Timeline Sejarah kerja sama Hubungan Tiongkok-Vietnam.....	24
Tabel 3.1. Timeline Sejarah kerja sama Hubungan Tiongkok-Vietnam.....	26
Tabel 3.2. Neraca Perdagangan Tiongkok-Vietnam Periode 2014-2023.....	27
Tabel 3.1. Perkembangan kerja Sama Ekonomi Vietnam dan Tiongkok Periode 2014-2023.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Cakupan Wilayah Sengketa Laut Tiongkok Selatan.....	32
Gambar 3.1. Forum Bilateral Pemimpin Vietnam dan Tiongkok Tahun 2023...	48

ABSTRAK

Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu konflik terpanjang dalam sejarah moderen yang dimulai sejak 1947 ketika pemerintah Tiongkok mengklaim wilayah perairan ini melalui konsep Nine Dash Line. Hingga periode 2014-2023 sengketa ini belum dapat diselesaikan secara mendasar dan kemudian ditanggapi secara beragam oleh negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara. Vietnam merupakan salah satu negara yang berupaya merespon sengketa tersebut secara proporsional dengan memperhatikan pencapaian kepentingan nasional dan stabilitas keamanan global. Pada penelitian ini, penulis akan membahas tentang upaya Vietnam dalam menghadapi Tiongkok di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder, sedangkan teori yang digunakan konsep Hedging yang dirumuskan oleh Peter J. Katzenstein dan Allen Carlson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Vietnam dalam menghadapi Tiongkok di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan dijalankan melalui strategi untuk tidak memihak (*not taking side*) dengan menjaga posisi diantara pihak-pihak yang bersengketa (*non-alignment*), mencari potensi untuk meminimalkan resiko (*insurance seeking*), serta mengembangkan kebijakan politik keamanan untuk menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian (*uncertainty in structural conditions*), *All available instruments pursued in an opposite and mutually counteractive* sebagai sarana utama (*principal means*).

Kata kunci : Sengketa Laut Tiongkok Selatan, Vietnam, Konsep Hedging.

ABSTRACT

The South China Sea dispute is one of the longest-running conflicts in modern history, beginning in 1947 when the Chinese government claimed these waters through the Nine-Dash Line concept. From 2014 to 2023, this dispute has not been fundamentally resolved and has drawn varying responses from countries in East and Southeast Asia. Vietnam is one of the countries attempting to respond to the dispute proportionally, while considering national interests and global security stability. In this study, the author will discuss Vietnam's efforts to confront China in the South China Sea dispute. This research uses a qualitative descriptive method with secondary data collection techniques, while the theory used is the hedging concept formulated by Peter J. Katzenstein and Allen Carlson. The results of this study indicate that Vietnam's efforts to confront China in the South China Sea dispute are carried out through a strategy of non-alignment, seeking insurance potential, uncertainty in structural conditions, and pursuing all available instruments in an opposite and mutually counteractive manner.

Keyword : South China Sea Conflict, Vietnam, Hedging Concept.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sengketa Laut Tiongkok Selatan menjadi konflik yang tidak lepas dari perkembangan sejarah regional dan internasional. Konflik ini melibatkan Tiongkok dan beberapa negara di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Konflik ini tidak lepas dari geo-politik Laut Tiongkok Selatan memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai kawasan pusat kegiatan geopolitik, keamanan, perdagangan, dan lingkungan maritim (CNBC 2023). Selain itu, Laut Tiongkok Selatan juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya sumber daya energi seperti minyak dan gas alam di dasar lautnya. Berdasarkan Badan Informasi Energi Amerika Serikat, wilayah Laut Tiongkok Selatan menyimpan cadangan gas alam sebanyak 190 triliun kaki kubik, serta 11 miliar barel minyak bumi (The Purnomo Yusgiantoro Center 2022).

Dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan ternyata terdapat anomali politik keamanan yaitu terjalinnya hubungan yang cukup harmonis antara Vietnam dan Tiongkok. Menelisik lebih spesifik mengenai hubungan kedua negara terjalin karena memiliki sebuah kesamaan pada aspek ideologi, yakni sama-sama condong ke arah ideologi kiri. Dari kesamaan yang ada, menjadikan hubungan kedua negara dalam melangsungkan kerja sama menjadi lebih cepat beradaptasi (Thu 2018). Tiongkok yang melihat potensi besar yang didapatkan apabila melangsungkan hubungan kerja sama dengan Vietnam tentu tidak bisa untuk dihindari, walaupun

hubungan kedua negara masih terbilang rumit dilihat dari beberapa aspek seperti Tiongkok yang ingin mendominasi Vietnam dalam hal ekonomi yang mengakibatkan Vietnam mengurangi dominasi tersebut dengan cara mengikuti *free trade agreement* oleh negara lainnya (Tran and Chan 2021), namun tetap untuk mengusahakan keberlangsungan kerja sama ekonomi guna meningkatkan kepentingan nasional bangsa.

Hubungan Tiongkok dan Vietnam berjalan dalam waktu yang panjang. Tiongkok juga merupakan negara pertama yang mengakui akan berdirinya *Socialist Republic of Vietnam* pada Januari 1950 (Thu 2020). Hubungan yang memang sudah berlangsung lama tersebut tidak mampu memberikan cerminan terhadap keberlangsungan kerja sama yang damai antara kedua belah pihak. Ditandai pada tahun 1975 pengaruh dari Soviet (saat ini Rusia) yang semakin meningkat mengakibatkan Tiongkok untuk mengambil tindakan, guna mencegah pengaruh tersebut. Hingga di tahun 1979 perang antara kedua belah pihak yakni Tiongkok dan Vietnam pun pecah dengan intensitas yang terbilang masih rendah, digunakan sebagai sebuah ancaman untuk Vietnam agar mengakhiri kerja sama dengan Soviet yang pada kala itu menjadi musuh terbesar Tiongkok (Ross 2020). Kemudian di tahun 1991 normalisasi hubungan Tiongkok dan Vietnam Pun berlangsung, kedua negara menyepakati bahwa kedua negara akan menyudahi hubungan yang tidak sehat tersebut, hubungan yang diharapkan akan dilaksanakan dengan cara yang lebih bersahabat dan bermanfaat (Cuong and Hoa 2018).

Adanya normalisasi hubungan antara Tiongkok dan Vietnam menghasilkan kerja sama ekonomi yang memberikan keuntungan kepada dua belah pihak. Di

Antara tahun 1981 hingga 2012 tercatat kedua negara mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan (Malesky and London 2014). Kemudian, untuk total nilai ekspor Tiongkok ke Vietnam dari tahun ke tahun semakin meningkat, terutama dimulai dari tahun 2006, seperti pada grafik 1.1. berikut ini :

Grafik 1.1.
Perkembangan Ekspor Tiongkok ke Vietnam
Periode Tahun 2006-2021 (Milyar US Dollar)



Sumber: (Statista 2021)

Secara lebih spesifik lagi, pada tahun 2021 Tiongkok melakukan ekspor ke Vietnam dengan total \$129 miliar AS, di mana selama 26 tahun terakhir adalah ekspor dengan jumlah yang semakin meningkat, tercatat dari \$718 juta pada tahun 1995 menjadi \$129 miliar AS pada tahun 2021. Barang utama yang menjadi barang ekspor adalah sirkuit terpadu, telepon, dan kain-kain rajutan (OEC World 2022).

Hubungan kerja sama ekonomi yang tetap berjalan tersebut memberikan keuntungan bagi kedua negara yang terlibat, namun di balik semua kerja sama ekonomi yang ada, terdapat sebuah konflik tidak asing bagi kedua negara dimana

permasalahan yang terkait seperti perselisihan daerah teritorial maritim, persaingan geopolitik, serta masalah keamanan (Thu 2020). Namun fokus dari penelitian ini terdapat pada perselisihan daerah maritim, yaitu terkait permasalahan Laut Tiongkok Selatan. Setelah sempat mereda, konflik laut Tiongkok Selatan kembali tidak stabil dikarenakan perdebatan antara Tiongkok dan Vietnam yang terulang kembali pada tahun 2014 lalu (Panda and Strangio 2016). Pada masa tersebut, Tiongkok melakukan pengeboran minyak di Laut Tiongkok Selatan (lebih tepatnya di wilayah lautan pulau Parcel) dimana wilayah perairan tersebut masuk ke dalam wilayah Vietnam. Akibat dari peristiwa pengeboran minyak memunculkan masyarakat anti Tiongkok di Vietnam. Hubungan kedua negara menjadi tidak stabil, sebab dari kedua belah pihak tidak ada yang menganggap diri mereka salah (Pearson and Vu 2019). Kedua belah pihak melegitimasi masing-masing bahwa Pulau Parcel tersebut adalah bagian dari kepemilikan mereka, Tiongkok menganggap Pulau Parcel adalah bagian wilayah Tiongkok, begitu pula Vietnam.

Terlepas dari hubungan kedua negara yang terbilang cukup rumit, Tiongkok melakukan kelonggaran peraturan terhadap Vietnam mengenai Laut Tiongkok Selatan walaupun wilayah tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh Tiongkok. Salah satu kelonggaran peraturan yang diberikan yaitu terkait kapal penangkapan ikan milik Vietnam yang semestinya mendapatkan penegakan hukum sebab diduga penangkapan ikan tersebut bersifat ilegal oleh Tiongkok, mengalami pengurangan jumlah kapal yang mendapatkan penegakan hukum dari 73 kapal menjadi 41. Bahkan kedua negara melakukan patroli bersama di wilayah Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dan Vietnam lebih tepatnya di Teluk Tonkin untuk melakukan

penangkapan terhadap kapal penangkap ikan ilegal lainnya (Ross, 2020). Upaya dari Tiongkok yang dilakukan untuk mengambil hati Vietnam untuk tetap menjalankan kerja sama yang stabil dan pasti dengan Tiongkok, juga mengurangi pengaruh dari AS di Vietnam (Rahmawati 2022).

Sengketa antara Tiongkok dan Vietnam terkait Laut Tiongkok Selatan tidak hanya menciptakan ketegangan militer dan potensi konflik bersenjata, namun juga mengurangi peningkatan kerja sama politik dan ekonomi antara kedua negara tersebut (Path 2018). Vietnam tidak jarang mengkritik tindakan penjaga pantai (*coast guard*) yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, dan menyatakan bahwa negara-negara tetangganya telah melakukan tindakan yang melanggar hak kedaulatan mereka (Reuters 2018).

Meskipun upaya-upaya penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun hingga sekarang ketegangan di Laut Tiongkok Selatan belum mereda. Di sisi lain, pada periode tahun 2014-2023 terjadi anomali bahwa di tengah-tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan berbagai negara Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Vietnam, justru hubungan bilateral antara kedua negara antara Tiongkok dan Vietnam dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan perkembangan perdagangan kedua negara yang berkembang secara progresif yang didukung dengan kesepakatan berbagai proyek kerja sama di berbagai dalam kurun waktu sembilan tahun dari 2014 hingga 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

“Bagaimana upaya Vietnam dalam menghadapi Tiongkok di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut tentang upaya Vietnam dalam menghadapi Tiongkok di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian memiliki cakupan penelitian periode waktu dari tahun 2014 hingga 2023. Dipilih tahun 2014 karena penulis menganggap bahwa periode ini menjadi wujud peningkatan (eskalasi) sengketa Laut Tiongkok Selatan setelah beberapa tahun berjalan yang ditandai dengan konflik Kepulauan Parcel, Kepulauan Pratas, Kepulauan James Shoal dan beberapa gugus kepulauan lainnya hingga insiden tabrakan kapal Vietnam dan Tiongkok. Kemudian pada tahun 2023 dipilih sebagai periode yang menunjukkan penurunan (de-eskalasi) sengketa tersebut yang ditandai dengan kedekatan hubungan Tiongkok dan Vietnam di tengah sengketa tersebut yang ditunjukkan hubungan kerjasama di bidang ekonomi, diplomasi hingga kunjungan pemimpin kedua negara.

Cakupan penelitian lainnya adalah berbagai alasan dan kepentingan yang memutuskan untuk tetap berupaya menjaga kedekatan hubungan dengan Vietnam melalui berbagai pertimbangan dalam bidang politik, pertahanan dan ekonomi. Kemudian cakupan penelitian lainnya berkaitan dengan periodisasi penelitian yaitu pada tahun 2014 hingga 2023. Dipilih tahun 2014 karena pada tahun ini terjadi insiden tabrakan kapal kedua negara di anjungan lepas pantai yang ternyata berhasil diselesaikan dalam kerangka diplomasi, sedangkan tahun 2023 dipilih karena mampu menunjukkan kedekatan hubungan Vietnam dan Tiongkok yang ditandai dengan kunjungan kenegaraan oleh Presiden China Xi Jinping yang berhasil bertemu dengan Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, Nguyen Pu Trong di Hanoi pada 12 Desember 2023. (Antara News 2023) Pertemuan tahun 2023 ini menjadi tolok ukur kemajuan kerja sama antara Vietnam dan Tiongkok yang ditandai dengan meningkatnya investasi atau FDI (*Foreign Direct Investment*) yang mencapai 4,73 triliun US Dollar yang merupakan angka terbesar dalam sepanjang sejarah kedua negara dan juga didukung dengan beberapa pencapaian lainnya, diantaranya perdagangan dan kerja sama pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya. (Vietnam Briefing 2025)

1.5 Tinjauan Pustaka

Untuk dapat menganalisis penelitian ini lebih mendalam, penulis menggunakan beberapa sumber untuk menunjang penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tentunya penelitian yang dicantumkan nantinya

sebagian besar mengenai Tiongkok dan Vietnam dengan masing-masing topik yang menarik.

Penelitian pertama yang digunakan sebagai acuan untuk melanjutkan penelitian ini yakni berjudul *Vietnam's Relations with China and the US and the Role of ASEAN* ditulis oleh Tran Truong Thuy. Pada tulisan tersebut dituliskan mengenai hubungan Vietnam dengan Tiongkok, di mana hubungan kedua negara terdapat AS yang menjadi negara lain yang dilihat dari segi pandang Tiongkok adalah negara yang dapat memengaruhi Vietnam, sehingga negara ini sewaktu-waktu dapat merubah haluan ke arah AS. Bagian awal tulisan dari Thuy membahas tentang kebijakan luar negeri Vietnam yang memfokuskan pada tiga hal yakni pembangunan, keamanan, dan memperkenalkan negara ke kancah internasional, dan fokus tersebut masih tetap dijalankan hingga sampai saat ini. Selain itu, pada tulisan yang tulis oleh Thuy ini memberikan sudut pandang dari Vietnam yang melangsungkan kerja sama dengan Tiongkok, dimana kerja sama yang terjalin seperti sebuah tugas yang cukup memiliki sebuah tantangan dalam menjalankannya. Sebab dikatakan bahwa Tiongkok adalah negara yang selalu melakukan kemauan negaranya dengan sepenuh hati. Vietnam yang pernah melangsungkan perang dengan intensitas yang rendah dengan Tiongkok tentunya menjadi lebih waspada dalam melangsungkan kerja sama agar tetap stabil. Thuy juga memaparkan bagaimana kerja sama yang berlangsung dengan AS dengan posisi Vietnam tidak bisa bertindak lebih jauh lagi dalam melaksanakan kerja sama dengan AS, cukup dengan melangsungkan kerja sama ekonomi, Thuy menjelaskan secara singkat. Terakhir Thuy mengungkit sedikit mengenai peran ASEAN yang

cukup membantu Vietnam dalam mengurangi konflik antara Vietnam dengan Tiongkok (Thuy 2013).

Pada tulisan kedua yang menjadi sumber acuan ini berbeda dengan penelitian di paragraf atas yang menjelaskan dengan melihat sudut pandang Vietnam, tulisan kedua lebih fokus dengan melihat dari sudut pandang Tiongkok. Tulisan kedua yang ditulis oleh Robert S. Ross dengan judul *China-Vietnamese Relations in the Era of Rising China: Power, Resistance, and Maritime Conflict*. Ross memaparkan dengan menjelaskan terlebih dahulu awal kerja sama Tiongkok dan Vietnam. Hingga sampai pada kemunculan konflik yang selalu ada, yakni tentang permasalahan maritim yang tumpang tindih antara kedua negara, yang sama-sama mengakui kepemilikan wilayah di Laut Tiongkok Selatan. Tulisan kedua juga memaparkan mengenai kerja sama yang terjalin antara Vietnam dengan AS, dimana Tiongkok melihat keberlangsungan kerja sama tersebut sebagai sebuah ancaman kebangkitan bagi Tiongkok, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Vietnam menjadi lebih koersif di wilayah laut Tiongkok Selatan. Penelitian atau tulisan kedua menjelaskan hubungan Tiongkok dan Vietnam dengan menjelaskan progress kerja sama yang rumit antara kedua negara, namun kerja sama yang berlangsung rumit tersebut akan tetap berlangsung kedepannya dengan usaha dari kedua negara yang harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang akan merugikan kedua negara (Ross 2020).

Menurut penelitian ketiga yakni *Looking Back On Vietnam-China Relations Since The Establishment Of Strategic Cooperative Partnership* oleh Nguyen Thi Phuong Hoa dan Nguyen Xuan Cuong, menjelaskan pada awal tulisan

hubungan Vietnam dan Tiongkok berada pada tahap yang menjadi lebih baru, sebab berlangsungnya sebuah kesepakatan kerja sama yang baru yakni kerja sama kemitraan yang komprehensif, diyakini mampu menjadi tonggak baru kerja sama kearah yang lebih stabil dan baik. Disebutkan pula oleh kedua penulis tulisan tersebut bahwa Vietnam adalah negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang menjalankan bentuk kerja sama yang komprehensif dengan Tiongkok. Dikatakan juga bahwa Vietnam adalah negara yang mampu memberikan peran yang penting bagi Tiongkok untuk meluaskan pengaruhnya. Sehingga penulisan dari tulisan ketiga ini memaparkan semua bentuk tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok seperti yang dilakukan di Laut Tiongkok Selatan merupakan sebuah tindakan yang dilihat oleh beberapa negara lainnya sebagai tindakan yang bertentangan, yang sebenarnya tindakan tersebut adalah upaya dari Tiongkok untuk memperlihatkan pengaruhnya kepada dunia. Pada akhir tulisan, kedua penulis menyatakan bahwa hubungan antara Tiongkok dan Vietnam masih terbilang jauh dari kata stabil dan masih bersifat asimetris (Hoa and Cuong 2020).

Berdasarkan ketiga penelitian di atas maka dapat ditemukan beberapa *research gap* (kesenjangan penelitian). Pada penelitian Tran Truong Thuy menunjukkan bahwa hubungan Tiongkok dan AS membuktikan bahwa negara ini hingga pertengahan dekade 2010 tidak tergantung pada negara tertentu. Kemudian Robert S. Ross menunjukkan bahwa dinamika kerja sama Tiongkok dan Vietnam tidak akan bisa dipisahkan dengan sengketa batas perairan, serta dikaitkan dengan Thi Phuong Hoa dan Nguyen Xuan Cuong bahwa hubungan Tiongkok dan Vietnam akan terus berjalan dalam konstelasi politik-keamanan yang berubah-ubah karena

adanya interdependensi yang kuat dari kedua negara ini. Pada penelitian ini, penulis akan mengembangkan paradigma penelitian yang memiliki unsur kebaruan yaitu berkaitan dengan harmoni antara kerja sama luar negeri Vietnam dan Tiongkok di tengah-tengah konflik dan ketidakpastian.

Berdasarkan pada kajian tulisan-tulisan di atas maka dapat difahami, sekaligus dapat ditarik benang merah bahwa Vietnam merupakan negara Asia Tenggara yang memandang Tiongkok bukan sebagai ancaman, seperti negara-negara lain pada umumnya, seperti halnya Indonesia, Malaysia, Filipina bahkan Jepang. Fenomena ini menjadi anomali politik karena perspektif Vietnam terhadap Tiongkok ini terbentuk atas berbagai pengalaman dan perjalanan panjang hubungan bilateral kedua negara. Melihat kajian-kajian terdahulu di atas mengindikasikan bahwa kedekatan antara Vietnam dan Tiongkok dalam membangun kerja sama yang sangat intensif (*mutual relationship*) merupakan upaya kedua negara untuk mewujudkan kepentingan nasional. Dalam perspektif Vietnam keberadaan Tiongkok dapat mendukung pembangunan dalam negeri, meliputi perdagangan luar negeri, manufaktur, investasi asing atau FDI (*Foreign Direct Investment*) hingga pertahanan. Kemudian di sisi lain, Tiongkok memandang Vietnam sebagai negara yang menjadi *pivot point* sebagai pengembangan perluasan hegemoni di wilayah Asia Tenggara, khususnya wilayah Indocina.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab rumusan masalah tentang tentang alasan dan latar belakang Tiongkok yang memutuskan untuk tetap berupaya menjaga kedekatan

hubungan dengan Vietnam meskipun hubungan tersebut berkembang di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan yang relevan, yaitu Konsep Hedging yang dirumuskan oleh Peter J. Katzenstein dan Allen Carlson, *et, all* sebagai konsep dan perspektif yang konsep *Balancing* dan *Bandwagoning*. Gambaran tentang pendekatan ini masing-masing akan diuraikan sebagai berikut.

Konsep *Balancing* merupakan merupakan bagian dari teori hubungan internasional yang merujuk pada tindakan negara secara kolektif ataupun secara tunggal untuk mencegah negara lainnya dalam mendominasi konstelasi atau sistem internasional. Kemudian konsep *Bandwagoning* merupakan strategi yang diambil negara-negara lemah untuk mengembangkan hubungan dengan negara yang lebih kuat, serta di sisi lain terdapat konsep lainnya *hedging behaviour* yaitu inisiatif ataupun upaya suatu negara di tengah kondisi ketidakpastian.

Dalam dinamika politik internasional terdapat perilaku negara yang mengarah pada keberpihakan terhadap negara lain (*alignment behavior*) yang menegaskan bahwa suatu negara memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu sebelum memutuskan posisinya untuk mendekati atau menjauhi negara lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan Peter J. Katzenstein dan Allen Carlson, *et, all* yang selengkapnya menyatakan bahwa :

“...alignment behavior is defined as the manner and extent to which a state chooses to position vis-à-vis (align with or away from) a powerful player(s) in the regional and international system, based on the degree of convergence (and/or divergence) in interests and support among them across key policy domains.” (Cheng Chwee Kuik 2016)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa suatu negara berinteraksi dalam dinamika politik internasional untuk mewujudkan pencapaian kepentingan nasionalnya. Untuk itu perilaku dari negara terhadap negara lain dijalankan dengan memosisikan untuk dapat saling berhadapan atau yang dapat disebut dengan *vis-avis* atau justru menjauhi negara tersebut pada negara yang kuat atau negara dominator yang akan menguasai sistem regional ataupun internasional yang diputuskan berdasarkan konvergensi dalam seluruh domain kebijakan utama negara tersebut,

Konsep hedging menjadi relevan jika dikaitkan dengan upaya Vietnam dalam menghadapi Tiongkok di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan dibandingkan dengan dua konsep lainnya (Bandwagoning dan Balancing) karena beberapa alasan, pertama, sengketa tersebut diliputi dengan kondisi ketidakpastian, kedua, terdapat inisiatif negara-negara yang memiliki kepentingan dan motivasi yang sama dan ketiga, terdapat aspek kebenaran kolektif untuk menghindari konflik dan imperialisme, serta mendukung perdamaian. Pada penelitian ini penulis akan menganalisa lebih lanjut konsep Hedging Behavior menurut Cheng Chwee-Kuik (2024).

Dalam Konsep *Hedging Behavior* terdapat terdapat nilai utama yaitu inisiatif pihak-pihak yang tergabung dalam konstelasi politik internasional yang diwarnai dengan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko dan memaksimalkan keuntungan melalui tiga pendekatan masing-masing pertama, netralitas aktif (*active neutrality*), kedua, diversifikasi terbuka (*inclusive diversification*) dan ketiga, pengembangan potensi cadangan

secara bijaksana (*prudent fallback cultivations*). Dengan demikian Konsep Hedging Behavior negara pelaku tidak hanya memposisikan di tengah, namun juga memposisikan diri sebagai pihak yang berlawanan dengan dua negara yang bersengketa.(Chwee 2024)

Konsep *Hedging Behavior* dapat dilihat secara nyata bahwa negara berupaya menunjukkan sikap yang jelas sebagai penengah, bukan semata-mata euforia atau ikut-ikutan. Keputusan negara sebagai penyeimbang (*balancing*) diwujudkan tindakan dalam mencari aliansi untuk mewujudkan penyeimbangan internal dan penyeimbangan eksternal untuk melawan kekuatan yang paling mengancam. Langkah ini dijalankan dengan mencari manfaat dan peran bawahan terhadap kekuatan yang mendominasi dengan imbalan keuntungan atau keamanan, (Chwee 2024)

Hedging Behavior menjadi konsep yang berbeda dengan Bandwagoning yang menekankan pada perilaku negara untuk sepenuhnya berpihak pada kekuatan yang sedang berkembang, sedangkan pada Konsep Hedging Behavior cenderung netral tanpa melalui keberpihakan, namun tetap reaktif terhadap perkembangan yang terjadi. Gambaran tentang perbandingan Hedging Behavior dengan konsepsi lainnya lihat tabel 1.1. sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Perbandingan Konsep Balancing, Bandwagoning dan Hedging

No	Indeks	Balancing	Bandwagoning	Hedging
1.	<i>Penyelarasan tingkat makro</i>	<i>Sepenuhnya berpihak pada satu kekuatan melawan kekuatan lain</i>	<i>Sepenuhnya berpihak pada satu kekuatan (kekuatan yang sedang bangkit atau ancaman yang sedang berkembang).</i>	<i>Tidak memihak atau netral atau sama jaraknya dengan tidak berpihak melalui multi-alignment.</i>
2.	<i>Prinsip pengendali</i>	<i>Mencari keamanan dengan menyeimbangkan kekuatan terkuat</i>	<i>Pencarian utilitas dengan memaksimalkan keuntungan atay meminimalkan ancaman keamanan</i>	<i>Mencari asuransi, serta mitigasi dan mengimbangi risiko dan mengembangkan opsi penanggulangan.</i>
3.	<i>Prinsip makna</i>	<i>aliansi dan persenjataan, serta alat dan instrumen lainnya terutama sarana militer.</i>	<i>Sarana politik utama dengan menunjukkan penghormatan penuh dan perangkat lainnya.</i>	<i>Semua instrumen yang tersedia diupayakan melalui cara berlawanan dan saling bertentangan</i>
4.	<i>Kondisi sebelumnya</i>	<i>Kepastian dalam mengatasi ancaman utama dan pelindung utama</i>	<i>Kepastian dalam patron utama atau ancaman utama</i>	<i>Ketidakpastian dalam kondisi struktural, meliputi ancaman yang tersebar dan berbagai dukungan yang tidak pasti.</i>

Sumber : Diolah dari Chwee 2024

Konsep *Hedging Behavior* menjadi pendekatan yang relevan untuk menjawab dan menganalisis upaya Vietnam dalam menghadapi Tiongkok di tengah

sengketa Laut Tiongkok Selatan karena pada dasarnya berbagai keputusan Vietnam tersebut tidak lepas dari upaya mewujudkan pencapaian kepentingan nasional, Pencapaian ini dirumuskan berbagai pertimbangan yang sistematis dan rasional yang selaras dengan proposisi-proposisi yang ada dalam Konsep Hedging Behavior, masing-masing yaitu :

- a. *Not taking sides / non-alignment* atau tidak memihak dan tidak berpihak. Variabel ditinjau dari aspek penyelarasan pada tingkat makro (*macro level alignment*). Hal ini dapat dijelaskan bahwa suatu negara tidak akan memihak secara penuh, namun tetap membangun hubungan dengan entitas-entitas internasional lainnya.
- b. *Insurance-seeking, Mitigating and offsetting risks; Cultivating fallback options* atau upaya untuk mencari jaminan mengimbangi resiko yang kemungkinan akan terjadi dan sebagai upaya mencari solusi cadangan pada aspek prinsip penyelarasan (*principal drivers*). Hal ini dapat dijelaskan bahwa konstelasi politik internasional dipandang sebagai objek yang dinamis untuk itu respon dan tindakan tetap diperlukan berbagai kebijakan-kebijakan penyangga (*buffer policy*) sebagai solusi pendukung atas kebijakan principal tersebut.
- c. *All available instruments pursued in an opposite and mutually counteractive manner* atau dalam sarana utama (*principal means*) instrumentasi yang ada digunakan pada skema yang berlawanan di antara kedua kekuatan. Artinya negara akan menjaga posisinya di antara dua kekuatan yang ada tanpa harus terseret dalam dominasi salah satu kekuatan.

d. Uncertainty in structural conditions (diffuse threats, uncertain supports)

atau adanya ketidakpastian dalam kondisi struktural akibat ancaman yang terbesar di berbagai aspek dalam kerangka. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam kondisi sebelumnya yang dipenuhi oleh ketidakpastian terhadap adanya gejolak sehingga diperlukan keputusan nyata untuk dapat menjaga posisi di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Variabel-variabel dalam Konsep *Hedging Behavior* tersebut relevan dengan kasus upaya Vietnam dalam menghadapi Tiongkok di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan dijalankan melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat tidak memihak, baik terhadap Tiongkok ataupun entitas-entitas yang menjadi rival Tiongkok. Upaya ini dijalankan agar tidak terbentuk kecenderungan dan pembentukan kekuatan kolektif yang dapat memanasakan dinamika kawasan. Kemudian upaya Vietnam selanjutnya dijalankan mencari jaminan atas kemungkinan resiko yang akan terjadi dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui penerapan kebijakan keamanan dalam negeri dan luar negeri.

Upaya Vietnam dalam menghadapi Tiongkok di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan selanjutnya dikaitkan dengan Konsep *Hedging Behavior* dijalankan dengan tetap menjaga posisi yang jelas atau berlawanan dengan pihak yang mendominasi kekuatan dalam sengketa tersebut, Artinya Vietnam tetap berupaya menunjukkan posisinya sebagai negara yang tidak terikat di antara Tiongkok dan rival-rivalnya. Hal ini sebagai keputusan rasional karena kekuatan-kekuatan tersebut berada pada geopolitik yang sama

1.7 Argumen Sementara

Melalui uraian kerangka pemikiran di atas maka dapat ditarik argumen sementara bahwa upaya Vietnam dalam menghadapi Tiongkok di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan dijalankan melalui strategi untuk tidak memihak (*not taking side*) dengan menjaga posisi diantara pihak-pihak yang bersengketa (*non-alignment*), mencari potensi untuk meminimalkan resiko (*insurance seeking*), serta mengembangkan kebijakan politik keamanan untuk menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian (*uncertainty in structural conditions*), *All available instruments pursued in an opposite and mutually counteractive* sebagai sarana utama (*principal means*). Berdasarkan pada kajian tulisan-tulisan di atas maka dapat difahami, sekaligus dapat ditarik benang merah bahwa Vietnam merupakan negara yang memandang Tiongkok bukan sebagai ancaman, seperti negara-negara lain pada umumnya, seperti halnya Indonesia, Malaysia, Filipina bahkan Jepang. Fenomena ini menjadi anomali politik karena perspektif Vietnam terhadap Tiongkok ini terbentuk atas berbagai pengalaman dan perjalanan panjang hubungan bilateral kedua negara. Melihat kajian-kajian terdahulu di atas mengindikasikan bahwa kedekatan antara Vietnam dan Tiongkok dalam membangun kerja sama yang sangat intensif (*mutual relationship*) merupakan upaya kedua negara untuk mewujudkan kepentingan nasional. Dalam perspektif Vietnam keberadaan Tiongkok dapat mendukung pembangunan dalam negeri, meliputi perdagangan luar negeri, manufaktur, investasi asing atau FDI (*Foreign Direct Investment*) hingga pertahanan. Kemudian di sisi lain, Tiongkok memandang Vietnam sebagai negara yang menjadi *pivot point* sebagai pengembangan perluasan hegemoni di wilayah

Asia Tenggara, khususnya wilayah Indocina sebagai bagian dari fenomena kausalitas politik luar negeri kedua negara dan fenomena ini belum dibahas sebelumnya oleh akademisi program studi hubungan internasional.

1.8 Metode Penelitian

Dengan melakukan metode kualitatif ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut merupakan data yang telah ada dari pihak lain yang telah melakukan penelitian secara langsung maupun yang tidak langsung. Penulis menggunakan hasil data yang sudah ada berupa jurnal, buku, berita dan website resmi. Data-data yang sudah didapatkan akan digunakan sebagai data pendukung argumen utama penulis, lalu data-data tersebut akan digali lagi oleh penulis menjadi sebuah data yang sederhana dan mudah dipahami di dalam bentuk tulisan skripsi ini. Dan juga memerlukan analisis yang tepat dengan menggunakan teori atau konsep untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang dari penelitian ini.

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif, dikarenakan metode kualitatif ini merupakan salah satu metode yang tepat untuk memenuhi tujuan penelitian. Di dalam penelitian ini akan membahas kepentingan dan motivasi Tiongkok terhadap Vietnam, maka penelitian ini akan dibahas yang bersifat deskriptif. Selain itu, dalam penelitian ini akan didukung oleh data-data yang diberikan dari penulis. Landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian

ini akan memengaruhi penelitian, sehingga keduanya akan berhubungan satu sama lain untuk memberikan penglihatan umum (Atkinson 2017).

Definisi Metode penelitian secara umum adalah tata cara ilmiah untuk mendapatkan sumber data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research* atau ada juga ahli yang menerjemahkan *research* sebagai *riset*. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re* yang berarti “kembali” dan *to search* yang berarti mencari. Dengan demikian arti sebenarnya dari *research* atau *riset* adalah “mencari kembali” (Nazir 2005). Penelitian memberi kontribusi pada penelitian atau sebuah karya ilmiah. Dengan perannya studi penelitian adalah pencarian sebuah ilmu pengetahuan melalui objektif dan sistematis yang dapat menemukan solusi dalam suatu masalah. Dengan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif.

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang akan menghasilkan sebuah fakta yang ada. Bisa didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang nantinya akan menghasilkan sebuah fakta. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono 2005). Dalam penelitian kualitatif ini adalah penelitian berasal dari data, yang memanfaatkan teori yang ada sebagai penjas.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian yang berjudul upaya Vietnam dalam menghadapi Tiongkok di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan ini menjadikan subjek penelitian yaitu

Vietnam. Kemudian objek dari penelitian ini adalah strategi bandwagoning dalam menghadapi Tiongkok di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dengan melakukan metode kualitatif ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut merupakan data yang telah ada dari pihak lain yang telah melakukan penelitian secara langsung maupun yang tidak langsung. Penulis menggunakan hasil data yang sudah ada berupa jurnal, buku, berita dan website resmi. Data-data yang sudah didapatkan akan digunakan sebagai data pendukung argumen utama penulis, lalu data-data tersebut akan digali lagi oleh penulis menjadi sebuah data yang sederhana dan mudah dipahami di dalam bentuk tulisan skripsi ini. Dan juga memerlukan analisis yang tepat dengan menggunakan teori atau konsep untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang dari penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan sebuah kajian pustaka untuk mengetahui dan memastikan penelitian ini belum pernah ada yang diteliti oleh 30 lain sebelumnya. Pada tinjauan pustaka penting mengumpulkan data-data yang dianggap penting dan relevan bertujuan untuk dimasukan dan digali di dalam penelitian skripsi dan juga sebagai pembeda dari penelitian yang telah melakukan penelitian sebelumnya. lalu, Penelitian ini akan dilanjutkan dengan mencari sumber atau data yang bersumber dari buku, artikel jurnal, berita, maupun data yang berasal dari internet dengan situs web resmi. Sumber-sumber yang telah didapatkan akan digunakan sebagai data pendukung argumen utama penulis. Dan sumber tersebut

akan diolah lagi oleh penulis menjadi sebuah data sederhana dan mudah dipahami yang terdapat dalam bentuk tulisan skripsi ini. Selain itu diperlukan analisa yang tepat dengan menggunakan teori atau konsep untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi atas empat bab dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data dan proses penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang membahas tentang dinamika hubungan Vietnam-Tiongkok, meliputi perkembangan dan deskripsi sengketa Laut Tiongkok Selatan, meliputi sejarah, perkembangan dan berbagai dampak yang ditimbulkan.

Bab III merupakan bab yang membahas tentang upaya Vietnam dalam menghadapi Tiongkok di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan dijalankan melalui penyesuaian kebijakan luar negeri meliputi *indirect balancing*, *dominance denial*, *economic pragmatism*, *binding engagement*, serta *limited bandwagoning*.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

HUBUNGAN TIONGKOK-VIETNAM DAN DINAMIKA SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN

Vietnam merupakan negeri Asia Tenggara yang terdampak konflik pada sengketa Laut Tiongkok Selatan. Pada awal dekade 1910-an, Tiongkok terlibat dengan beberapa negara Asia Timur dan Asia Tenggara, diantaranya Taiwan, Brunei Darusalam, Filipina, Malaysia, Indonesia dan beberapa negara lainnya. Awal mula konflik ini ternyata bukan saja berkaitan dengan posisi geo-strategis Laut Tiongkok Selatan, namun aktifitas eksplorasi minyak dan gas oleh Tiongkok.

Hubungan Tiongkok-Vietnam menjadi fenomena yang menarik di tengah-tengah konstelasi politik-keamanan wilayah Asia Tenggara yang berubah secara dinamis. Kedua negara berhasil mencapai perkembangan kerja sama yang pesat dalam kerangka *mutual relationship* setelah melewati rangkaian sejarah panjang. Pada periode 2014-2023 hubungan Tiongkok-Vietnam dihadapkan pada sengketa Laut Tiongkok Selatan yang berdampak pada dinamika politik keamanan Asia Tenggara dan Asia Timur. Pada bab II ini dibahas lebih lanjut tentang dinamika hubungan Tiongkok dan deskripsi sengketa Laut Tiongkok Selatan.

2.1. Hubungan Tiongkok-Vietnam

Hubungan Vietnam dan Tiongkok telah melalui rangkaian sejarah panjang yang fluktuatif yang terkadang berjalan dengan baik, namun pernah melewati hubungan bilateral yang buruk. Tahun 1991 menjadi tonggak sejarah hubungan

kedua negara yang ditandai dengan normalisasi hubungan bilateral setelah sekian lama hubungan berkembang cenderung memanas. Pasca normalisasi hubungan kedua negara berangsur-angsur membaik yang ditandai dengan peningkatan kerja sama luar negeri dan perdagangan luar negeri antara Vietnam dan Tiongkok. (International Sindo 2023)

Sejarah hubungan Tiongkok dan Vietnam telah ada sebelum era modern. Berdasarkan kajian yang dikeluarkan oleh British History and Encyclopedia, hubungan kedua negara telah berjalan sejak periode abad ke-3 atau 5 SM (Sebelum Masehi). Sepanjang dua abad ini, antara bangsa Vietnam dan Tiongkok klasik berupaya memperebutkan pengaruh antara dinasti Thuc yang menguasai wilayah Vietnam dengan Dinasti Han yang menguasai wilayah Tiongkok. (Dillon 2016) Hal ini sesuai dengan pernyataan Steven J Hood yang merupakan analisis sekaligus sejarawan Asia dan Orientalis yang menyatakan bahwa perkembangan sejarah orientalis pada abad ke-5 sebelum masehi menunjukkan perkembangan yang menarik. Pada masa ini, telah muncul kelas menengah yang semakin pragmatis untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi, bukan yang lain. Persaingan justru terjadi pada kelompok elit politik dan lambat laun persamaan sosial dan budaya antara Vietnam dan China menjadikan hubungan berlangsung secara intensif, meskipun tetap fluktuatif. Inilah yang menjadikan fakta bahwa hubungan antara Vietnam dan Tiongkok akan terus berjalan meskipun secara fluktuatif, terkadang hubungan dapat berjalan dengan harmonis, namun terkadang diwarnai dengan friksi yang cenderung buruk. (Hood 2019)

Sejarah hubungan Tiongkok dan Vietnam kemudian dihadapkan pada imperialisme bangsa Eropa ketika kedua negara sedang terlibat konflik, yaitu pada masa kepemimpinan dinasti Qing dan Kaisar Loi. Kondisi ini menjadi awal bagi abad kegelapan kedua negara tidak terhubung karena menjadi obyek dari imperialisme bangsa Barat (Eropa). (Hood 2019) Berbagai peristiwa penting dalam dinamika sejarah hubungan Tiongkok dan Vietnam pada masa pra modern hingga masa Pasca Perang Dunia II, lihat tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Timeline Sejarah kerja sama Hubungan Tiongkok-Vietnam

No	Periode	Keterangan
1.	Abad ke-5 SM	Hubungan Vietnam dan Tiongkok pertama kali yang ditandai dengan sengketa Dinasti Thuc (Thuc Dynasty)
2.	Pertengahan Abad ke-2	Terbentuk hubungan perdagangan antara Vietnam dan Tiongkok antara wilayah Au Viet dengan Guangdong.
3.	Tahun 939	Pengakuan kemerdekaan Vietnam atas Tiongkok pada masa monarki klasik.
4.	Tahun 1884	Imperialisme Bangsa Eropa (Perancis dan Inggris) ke wilayah Tiongkok dan Vietnam.
5.	Tahun 1965	Hubungan Vietnam-Tiongkok mengalami kerenggangan ketika amerika Serikat berupaya mengembangkan hubungan melalui alokasi dan pembangunan.
6.	Tahun 1979-1990	Terjadinya perang Vietnam-Tiongkok (<i>Sino-Vietnamese</i>) yang diawali dari kasus pendudukan PLA (<i>People Liberation Army</i>) di wilayah perbatasan kedua negara yang memicu ketegangan di kedua belah pihak.
7.	Tahun 1991	Normalisasi hubungan diplomatik hubungan Vietnam-Tiongkok.

Sumber : Diolah dari Steven Hood 2019

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa sejarah hubungan Tiongkok-Vietnam dapat dibedakan menjadi beberapa fase, dimulai dari pra-modern ketika kedua negara masih berbentuk monarki klasik. Kemudian sejarah hubungan kedua negara berkembang ke fase selanjutnya, yaitu periode imperialisme asing, hingga periode konflik kedua negara yang berakhir pada normalisasi hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Vietnam. Sejarah dan berbagai pengalaman masa lalu antara Tiongkok dan Vietnam ini kemudian berkembang dan memengaruhi hubungan kedua negara yang kuat hingga pada dekade 2010 hingga 2020-an.

Hubungan Tiongkok dan Vietnam pada dekade 2014 hingga 2020-an berkembang secara progresif di berbagai bidang. Pencapaian ini tidak lepas dari berbagai pengalaman masa lalu yang kemudian berpengaruh pada dinamika yang berkembang pada kedua negara. Pada bidang politik, hubungan Tiongkok dan Vietnam ditandai dengan kedekatan pemimpin kedua negara. Kasus terbaru yang dapat menjadi tolok ukur kerja sama kedua negara untuk dapat saling melengkapi adalah pertemuan antara La Ke Phiau yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam dan Jiang Zemin yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok pada pertemuan di Hanoi untuk penyatuan visi kedua negara (*Joint Statement for Comprehensive Cooperation*) yang diselenggarakan pada bulan Juli tahun 2000 sebagai tolok ukur hubungan dua negara yang berkembang sangat dekat dan intensif. (Brantly 2006)

2.2. Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu konflik terpanjang dalam sejarah dunia modern. Konflik ini mampu menjadi perhatian masyarakat internasional karena melibatkan banyak negara, baik dari wilayah Asia Timur ataupun Asia Tenggara. Konflik ini menjadi semakin menarik ketika Tiongkok sebagai aktor utama dari konflik ini justru tidak pernah terlibat konflik perairan secara terbuka dan konflik ini berkembang sebagai konflik urat syaraf dan unjuk kekuatan (*show of force*).

2.2.1. Sejarah Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Sejarah sengketa Laut Tiongkok Selatan tidak lepas dari kebijakan imperialisme masa lalu Bangsa Eropa yang menduduki beberapa negara di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur, khususnya Inggris, Perancis dan Spanyol. Ketika Perang Dunia II, Bangsa Eropa mengalami kekalahan dan kemudian meninggalkan wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur tersebut dengan meninggalkan batas-batas wilayah yang tidak cukup jelas. Beberapa kesepakatan sebagai hasil warisan pihak imperialis Eropa justru menjadi persoalan di periode yang akan datang, diantaranya Velarde Map, Scarborough Shoal, Treaty of Paris Tahun 1898, Treaty of Washington 1900 dan kesepakatan-kesepakatan lainnya (Raine 2017).

Pada tahun 1960-an, negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur sebagai wilayah yang terhubung secara langsung dengan Laut Tiongkok Selatan baru mengalami fase pra-kemerdekaan yang ditandai dengan upaya-upaya negara-negara di wilayah tersebut untuk membangun ekonomi, merestrukturisasi politik

dan pemerintahan, serta menangani berbagai persoalan sosial, di antaranya kemiskinan, keterbelakangan, Kondisi inilah yang menyebabkan sengketa Laut Tiongkok Selatan belum menjadi persoalan yang mengemuka pada masa tersebut. (Raine 2017)

Klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan berawal pada keputusan Partai Kuomintang pada tahun 1947 yang berhasil mengeluarkan proposal *Nine Dashline* yang merupakan garis garis imajiner tentang kekuasaan laut Tiongkok pada masa lalu. Sejak *event* politik tersebut agenda ini kemudian hilang dan tidak lagi menjadi pembahasan karena pada masa ini Tiongkok masih menjadi negara dunia ketiga dan menjadi negara miskin. Klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan kembali mengemuka pada pertengahan dekade 1970-an bersamaan dengan isu sengketa Kepulauan Spratly yang melibatkan Filipina. (Time Magazine 2016)

Dinamika sengketa Laut Tiongkok Selatan mengemuka pada awal dekade 2000-an bersamaan dengan kemajuan Tiongkok di bidang ekonomi politik dan pertahanan. Kemajuan perekonomian dengan nilai rata-rata di atas 7% pertahun dan kemampuan untuk mengembangkan sistem pertahanan, baik ditinjau dari alutsista, personel dan anggaran menjadikan ambisi Tiongkok mengemuka untuk mengontrol Laut Tiongkok. (Time Magazine 2016)

Kemajuan yang dicapai militer dan pertahanan Tiongkok pasca modernisasi secara besar-besaran dari kepemimpinan Hu Jintao dan kemudian berlanjut hingga kepemimpinan Xi Jinping ternyata menimbulkan berbagai dampak luas, yaitu meningkatnya ketegangan di wilayah Asia Timur, khususnya Laut Tiongkok Selatan hingga kawasan Asia Tenggara. Ini disebabkan Asia Tenggara sendiri

merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Tiongkok dan kemudian berdampak pada munculnya sengketa dengan beberapa negara tetangga, diantaranya Filipina, Malaysia, Indonesia, Vietnam dan beberapa negara lainnya

2.2.2. Perkembangan Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Perkembangan sengketa Laut Tiongkok Selatan pada era modern berawal dari ambisi Tiongkok untuk menguasai wilayah perairan yang selama ini menjadi mata rantai jalur pelayaran internasional. Setelah sekian lama hanya menjadi ambisi dan agenda nasional pada tahun 1994 Tiongkok untuk pertama kali terlibat klaim Kepulauan Spratly dengan Filipina. Pada masa ini Tiongkok mengirimkan kapal perang ke wilayah tersebut, namun tidak terjadi gesekan bersenjata, bahkan kasus ini juga menyeret keterlibatan Amerika Serikat. (Jstor 2023)

Berbagai kasus yang sama kemudian seringkali terjadi sepanjang tahun. Dalam kasus ini Tiongkok menunjukkan sikap agresivitasnya dengan mengerahkan kapal perang berbagai kelas yang didukung oleh alutsista udara, namun seperti pada periode-periode sebelumnya sengketa ini tidak berujung pada insiden atau kontak senjata.

Agresivitas Tiongkok di wilayah Laut China Selatan dipandang oleh negara-negara Asia Tenggara sebagai ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa sengketa wilayah perairan masih menjadi isu yang mengemuka di antara hubungan Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara. Meskipun konflik secara terbuka pada periode 2018-2021 tidak pernah terjadi, namun gesekan-gesekan yang ada dikhawatirkan akan memanaskan kondisi di Laut China Selatan. Kondisi ini pada

akhirnya memicu *security dilemma*, yaitu reaksi negara-negara Asia Tenggara untuk menerapkan kebijakan-kebijakan pertahanan tertentu dalam menyingkapi persoalan agresivitas Tiongkok tersebut. (Jstor 2023)

Secara geopolitik, wilayah Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah internasional terpenting bagi Tiongkok setelah Asia Timur. Asia Tenggara menjadi jalur pelayaran internasional yang sangat menentukan eksistensi industri-industri Tiongkok sebagai pemasok bahan baku industri, jalur pemasok energi hingga sebagai pangsa pasar menuju ke wilayah lainnya, seperti hanya Asia Tenggara hingga ke wilayah Asia Selatan bahkan Timur-tengah. Sengketa Laut Tiongkok Selatan setidaknya melibatkan enam negara secara langsung dan memengaruhi negara-negara lainnya dalam skala yang lebih luas.(BYJU 2024) Gambaran tentang hal ini lihat gambar 2.1. sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Cakupan Wilayah Sengketa Laut Tiongkok Selatan



Sumber : BYJU 2024.

Dari gambar di atas dapat dipahami bahwa negara yang terlibat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan adalah dominasi Tiongkok melawan negara-negara di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Negara ini meliputi Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Filipina, serta Taiwan. Dalam skala yang lebih luas, sengketa ini juga melibatkan negara lainnya termasuk Jepang, Indonesia, bahkan Amerika Serikat dan PBB melalui UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*). Dengan demikian, sengketa Laut Tiongkok Selatan telah berkembang menjadi konflik yang kompleks dan melibatkan berbagai negara dunia, baik wilayah Asia Tenggara ataupun Asia Timur.

Pada tahun 2014-2023, sengketa Laut Tiongkok Selatan masih menjadi persoalan yang mengemuka, sekaligus dipersepsikan sebagai ancaman oleh beberapa negara yang secara geopolitik berada di wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara dan Asia Timur. Gambaran tentang negara-negara dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan masing-masing yaitu :

a. Sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Filipina dengan Tiongkok.

Pada periode 2014-2023 sengketa ini merupakan tindak lanjut dari klaim Tiongkok atas wilayah kedaulatan Filipina, yaitu Palawan. Pulau ini terletak di Barat Daya Filipina yang berbatasan dengan wilayah Indonesia (Kalimantan). Pada tahun 2018 pemerintah Filipina menyatakan sikap keras ketika Pemerintah Tiongkok merencanakan untuk mengembangkan eksplorasi energi (minyak dan gas) di Kepulauan Sulu yang berdekatan

dengan Palawan karena dikhawatirkan akan menganeksasi Palawan sebagai wilayah yang memasok 15% energi Filipina.(CFR 2022)

Di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan hubungan antara Filipina dan Tiongkok masih dapat mengembangkan kerja sama, meskipun dalam prosentase yang kecil, bahkan pada tahun 2013 pemerintah Filipina menghentikan berbagai kerja sama dengan Tiongkok sebagai dampak atas insiden Scarborough yang terjadi pada 8 April 2013 akibat upaya penangkapan kapal nelayan Tiongkok yang masuk zona perairan Filipina oleh angkatan laut Filipina. Presiden Filipina, Brnigno Aquino III kemudian membawa insiden ini ke forum arbitrase internasional.

Seiring dengan berkembangnya waktu hubungan kerja sama Filipina dan Tiongkok pada tahun 2009 mengalami babak baru. Kedua pihak sepakat untuk mengembangkan agenda *Joint Action Plan for Strategic Cooperations* sebagai tolok ukur kedua negara untuk mengembangkan kerja sama yang lebih luas di berbagai bidang.(ETH Zurich 2014) Kemudian pada tahun 2016 Presiden Filipina Rodrigo Duterte berhasil bertemu dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping untuk membawa persoalan sengketa Laut Tiongkok Selatan ke dalam perundingan damai. Selain itu, pada tahun 2017 kerja sama Filipina dan Tiongkok juga berhasil menandatangani 14 kesepakatan di berbagai bidang, termasuk kerja sama transportasi dan militer sebesar 21 juta US Dollar.(The New York Times 2017)

Perkembangan kerja sama Filipina dan Tiongkok tetap dibayangi oleh sengketa Laut Tiongkok Selatan. Kedua negara ini pada

beberapa kasus pada tahun 2014 hingga 2023 berbagai pencapaian terjadi di berbagai bidang, namun sengketa ini terus berjalan. Terjadinya insiden penangkapan nelayan oleh kedua negara, bahkan penenggelaman Kapal Gem Veer oleh pemerintah Tiongkok menjadi tantangan bagi hubungan kerja sama kedua negara di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. (The New York Times 2017)

b. Sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Indonesia dengan Tiongkok.

Pada periode 2014-2023 sengketa ini terjadi akibat agresivitas Tiongkok di wilayah perairan utara Indonesia, khususnya di sekitar Kepulauan Natuna yang dilakukan oleh kapal perang Tiongkok ataupun Nelayan. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Kelautan Republik Indonesia di bawah Susi Pudjiastuti untuk melakukan penenggelaman kapal. Pada tahun 2014 hingga 2018 tercatat 26 kapal nelayan berbagai ukuran berhasil ditenggelamkan. Kasus ini memicu sikap keras dari pemerintah kedua negara, namun tidak sampai menimbulkan insiden secara terbuka. (The Jakarta Post 2018)

Hubungan Indonesia dan Tiongkok di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan menjadi fenomena yang menarik karena di satu sisi keberadaan Tiongkok bagi Indonesia menjadi negara yang penting karena masuk lima besar bersama dengan Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat dan Hongkong. (Goodstats, 2024) Di tengah-tengah isu sengketa Laut Tiongkok Selatan, antara Indonesia dan Tiongkok berhasil

mengembangkan kerja sama fungsional di berbagai bidang, diantaranya green economy, transportasi dan manufaktur hingga pengembangan energi terbarukan.(CNN Indonesia 2024)

Pencapaian kerja sama Indonesia dan Tiongkok di berbagai bidang menjadi tolok ukur kemajuan kerja sama di kedua negara. Munculnya sengketa Laut Tiongkok Selatan menjadi kendala yang berupaya diselesaikan melalui jalur perundingan, terlebih lagi sengketa ini telah terjadi sejak lama, namun tidak pernah berakhir dengan konflik terbuka atau konflik bersenjata. Sengketa Laut Tiongkok Selatan bahkan dipandang kedua negara sebagai konflik kepentingan dan ambisi, serta bukan konflik terbuka dalam arti sebenarnya.

c. Sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Malaysia dengan Tiongkok.

Pada periode 2014-2023 sengketa ini terjadi akibat agresivitas Tiongkok di wilayah perairan Malaysia. Kasus ini melibatkan kepala pemerintah dan nelayan Tiongkok yang melewati wilayah perairan Malaysia. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara pemimpin kedua negara karena Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad melalui MMFA (*Malaysian Maritime Enforcement Agency*) kepada pemerintah Tiongkok untuk berbagai peraturan internasional, termasuk UNCLOS pada tahun 2015. Kemudian pada Maret 2016 Pemerintah Malaysia mulai menerapkan kebijakan penegakan hukum yaitu penangkapan para pelanggar kedaulatan wilayah maritim dan para nelayan yang masuk ke wilayah kedaulatan Malaysia.(Asia Times 2018)

Hubungan Malaysia dan Tiongkok di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan tetap berjalan di tengah hubungan kedua belah pihak yang cenderung fluktuatif. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2014, Malaysia dan Tiongkok secara periodik setiap tahun juga berhasil menyelenggarakan *Strategic Consultation Meeting* untuk membahas kerja sama di berbagai bidang, diantaranya pembangunan infrastruktur seperti halnya pengembangan Bandara Internasional Kuala Lumpur hingga kerja sama pariwisata, bahkan pada tahun 2014 Malaysia dan Tiongkok akan memperingati 40 tahun pembukaan hubungan diplomatik kedua negara. (Bernama 2024)

Perkembangan kerja sama Malaysia dan Tiongkok pada tahun 2014-2023 berada pada perkembangan yang progresif, namun tetap pada dinamika yang fluktuatif. Sengketa Laut Tiongkok Selatan tetap menjadi faktor penghambat utama atas kerja sama bilateral Malaysia dan Tiongkok. Di tengah kerja sama ini, pada kurun waktu 9 tahun tersebut aparat patrol maritime dan angkatan laut Malaysia tetap bersiaga di Zona ZEE Malaysia di sekitar perairan Sabah dan Serawak yang sekaligus menunjukkan bahwa hubungan kedua negara tidak sepenuhnya baik, namun juga tidak sepenuhnya buruk. (Bernama 2024)

Perkembangan sengketa Laut Tiongkok Selatan tahun 2014-2023 menunjukkan adanya *spill over* wilayah yang luas. Pada kurun waktu sembilan tahun tersebut konflik tersebut menunjukkan belum tercapainya penyelesaian secara permanen. Di sisi lain, pada tahun 2014-2023 sengketa yang terjadi justru

tidak berkembang menjadi konflik secara terbuka berskala besar dengan menggunakan kekuatan bersenjata atau militer. Kondisi ini justru akan menimbulkan berbagai reaksi negara-negara yang memiliki akses ke wilayah Laut Tiongkok Selatan untuk menerapkan berbagai kebijakan defensif. (Asia Times 2018)

Keberadaan Vietnam sebagai negara yang terdampak langsung dengan dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan ternyata menunjukkan fenomena yang menarik. Fenomena ini berkaitan dengan terbangunnya hubungan bilateral antara Tiongkok dan Vietnam, meskipun kedua negara terlibat konflik sengketa Laut Tiongkok Selatan. Bersamaan dengan konflik ini terjadi anomali atau hal yang tidak biasa atas hubungan kedua negara tersebut karena sengketa Laut Tiongkok Selatan cenderung menyebabkan hubungan antara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara cenderung memburuk, diantaranya hubungan Tiongkok dengan Indonesia, Malaysia ataupun Filipina.

Hubungan Tiongkok dan Vietnam pada dekade 2020-an telah berjalan dengan harmonis di tengah-tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan yang masih berkembang secara fluktuatif. Hal ini mengindikasikan adanya kepentingan yang kuat dari Vietnam atas Tiongkok, baik dalam aspek ekonomi, politik ataupun militer. Kedekatan sejarah pada masa lalu dan perkembangan kerja sama kedua negara yang terus berjalan secara progresif dan berdampak pada munculnya ketergantungan di kedua, meskipun dalam kerangka kerja sama yang tidak seimbang atau *in-balance cooperation relationship*. (Asia Times 2018)

Hubungan Tiongkok dan Vietnam menunjukkan upaya untuk saling melengkapi, meskipun kedua negara dihadapkan pada sengketa Laut Tiongkok Selatan. Hubungan ini menjadi upaya untuk mengembangkan kerja sama dan mengoptimalkan pencapaian potensi di berbagai bidang. Posisi Tiongkok dalam kerja sama dengan Vietnam dijalankan dengan mengalokasikan berbagai anggaran, baik hibah, bantuan kredit ringan (*light debt*), teknis dan lain-lainnya yang menunjukkan bahwa kepentingan yang akan dicapai Tiongkok bersifat jangka panjang, sedangkan bagi kepentingan Vietnam lebih bersifat jangka pendek. Upaya Vietnam dalam mempertahankan hubungan dengan Tiongkok di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan dijalankan berbagai strategi yang merupakan harmonisasi dari ekonomi, politik dan militer. (Asia Times 2018) Berbagai upaya Vietnam dalam menghadapi Tiongkok di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan tersebut akan dibahas pada uraian bab selanjutnya (bab III).

BAB III

UPAYA VIETNAM DALAM MENGHADAPI TIONGKOK DI TENGAH SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN

Dinamika politik keamanan di wilayah Asia Tenggara pada dekade 2020-an tidak dapat dilepaskan dari Sengketa Laut Tiongkok Selatan. Persoalan ini muncul sebagai permasalahan klasik yang tidak bisa lepas dari sejarah panjang yang kemudian berkorelasi dengan beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam. Berbagai ketegangan dan gesekan dalam sengketa perairan ini ditindaklanjuti melalui berbagai strategi yang terangkum dalam empat hal, meliputi strategi tidak memihak hingga adaptasi ketidakpastian.

Dikaitkan dengan pendapat Cheng Chwee-Kuik menunjukkan bahwa upaya Vietnam dalam mengembangkan hubungannya dengan Tiongkok di tengah Sengketa Laut Tiongkok Selatan menjadi bentuk kebijakan luar negeri yang efektif untuk mendukung pencapaian kepentingan, sekaligus menjaga stabilitas keamanan kawasan. Hal ini tercermin atas kedekatan kedua negara yang ditandai dengan kunjungan pemimpin kedua negara, proyek kerjasama dan lain-lainnya.

Pasca kesepakatan kesepakatan antara Ziang Zemin dan La Ke kunjungan dan pembicaraan Tiongkok dan Vietnam menjadi lebih sering diselenggarakan. Pada kurun waktu sembilan tahun dari 2014-2023 tercatat terdapat enam kali kunjungan kenegaraan, bukan hanya Vietnam ke Tiongkok, namun juga sebaliknya. Gambaran tentang hal ini lihat tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Timeline Sejarah kerja sama Hubungan Tiongkok-Vietnam

No	Periode	Jumlah Kunjungan	Keterangan
1.	2014-2015	1	Kunjungan Presiden Vietnam Thruon Tan Sang ke Tiongkok untuk membahas tentang kerja sama investasi dan perdagangan.
2.	2016-2017	1	Kunjungan Presiden Vietnam Thruon Tan Sang ke Tiongkok untuk membahas tentang kerja sama investasi, kerja sama manufaktur dan energi terbarukan.
3.	2018-2019	1	Kunjungan Presiden Xi Jinping ke Vietnam untuk membahas tentang kerja sama investasi, proyek pengembangan infrastruktur dan alokasi bantuan luar negeri Tiongkok lebih dari 138 juta US Dollar ke Vietnam sebagai program hibah.
4.	2020-2021	2	Kunjungan Presiden Vietnam Thruon Tan Sang ke Tiongkok untuk membahas tentang kerja sama perdagangan luar negeri dan ditindaklanjuti dengan kunjungan Presiden Xi Jinping ke Vietnam untuk menindaklanjuti kerja sama Tiongkok-ASEAN dalam kerangka AFTA (Asean Free Trade Area).
5.	2022-2023	1	Kunjungan Presiden Vietnam Thruon Tan Sang ke Tiongkok untuk membahas tentang kerja sama keamanan, pertahanan (militer) berkaitan dengan pengadaan persenjataan, latihan bersama dan penanganan dampak konflik Laut Tiongkok Selatan.

Sumber : Diolah dari Steven Hood 2019 dan China Briefing 2024.

Dari tabel di atas dapat difahami bahwa sepanjang tahun 2014-2023 hubungan Tiongkok dan Vietnam mampu berkembang secara progresif. Pada kurun waktu sembilan tahun tersebut terdapat kunjungan kenegaraan secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa pada tingkatan elit politik kedua negara telah mengalami kesepahaman sikap yang memadai, sehingga dapat menjadi bagian dari pengembangan kerja sama kedua negara dalam lingkup yang lebih luas.

Perkembangan hubungan Tiongkok dan Vietnam pada tahun 2014-2023 dapat dilihat pada bidang ekonomi dan perdagangan yang berkembang signifikan. Pada kurun waktu Sembilan tahun tersebut, Vietnam berhasil mengekspor beberapa komoditas meliputi minyak mentah, batu bara, kopi dan berbagai makanan olahan, sedangkan ekspor Tiongkok ke Vietnam meliputi industri kimia dan farmasi, peralatan industri, minyak jadi, pupuk pertanian, serta kendaraan dan suku cadang kendaraan.(China Briefing 2024) Tiongkok dan Vietnam berhasil mengembangkan kerja sama Special Economic Zone pada tahun 2017 sebagai upaya mengembangkan sektor manufaktur dan perdagangan yang terintegrasi. Hal ini berdampak pada peningkatan neraca perdagangan luar negeri pada komoditas non-migas yang terus meningkat. Gambaran tentang hal ini lihat tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Neraca Perdagangan Tiongkok-Vietnam Periode 2014-2023

No	Periode	Jumlah (Milyar US Dollar)
1.	2014	381,9
2.	2015	420,8
3.	2016	422,6
4.	2017	437,5
5.	2018	498,9
6.	2019	517,9
7.	2020	569,1
8.	2021	577,0
9.	2022	581,9
10	2023	601,3

Sumber : China Briefing 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada kurun waktu Sembilan tahun tersebut, kerja sama perdagangan luar negeri dan manufaktur Tiongkok dan Vietnam mengalami perkembangan yang signifikan. Pada periode tahun tersebut negara perdagangan juga tidak pernah sekalipun menunjukkan penurunan. Pencapaian ini menjadi tolok ukur kemajuan kedua negara yang mampu berjalan dengan harmonis dan kondusif.

Pada bidang sosial dan budaya hubungan Tiongkok dan Vietnam pada tahun 2014-2023 menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya kontak masyarakat transnasional kedua negara. Pada tahun 2018 diperkirakan masyarakat Vietnam yang melakukan bisnis dan investasi di Tiongkok berjumlah lebih dari 2,4 juta orang, sedangkan masyarakat Tiongkok yang beraktivitas di Vietnam berjumlah sekitar 3,8 juta orang yang bekerja di berbagai bidang. Selain itu, pada tahun 2017/2018 semakin banyak masyarakat Vietnam yang memilih Tiongkok untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi di Tiongkok diantaranya Jiao Tong University, Tsinghua University, Huazhong Agriculture University dan beberapa perguruan tinggi lainnya. (Urban Sesame 2022) Berbagai pencapaian ini menjadi bentuk anomali upaya Vietnam terhadap Tiongkok di tengah-tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan yang berkembang secara dinamis. Gambaran tentang upaya Vietnam dalam menghadapi Tiongkok di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan akan dibahas pada bab III sebagai berikut.

3.1. Strategi Tidak Memihak Vietnam Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Strategi untuk tidak memihak (*not taking side*) merupakan keputusan suatu negara untuk menghindari posisi yang jelas dalam konstelasi keamanan tertentu. Keputusan untuk tidak memihak merupakan strategi untuk menghindari klaim sebagai negara kawan atau pun lawan yang nantinya akan berdampak yang lebih luas, diantaranya sebagai target yang nyata, meminimalisasi adanya dampak buruk yaitu munculnya krisis dan ketidakpercayaan dari publik hingga potensi untuk diterapkannya sanksi dari negeri lain yang terlibat dalam sengketa tersebut. Selain itu, terdapat juga strategi untuk menjaga posisi diantara pihak-pihak yang bersengketa (*non-alignment*) sebagai upaya untuk menghindari terseretnya suatu negara dalam konflik yang lebih besar. (Srinivasan and Mayal 2019)

Strategi untuk tidak memihak yang dijalankan Pemerintah Vietnam dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dijalankan untuk menegaskan bahwa Vietnam merupakan yang berdaulat dan tidak menjadi bagian dari kekuatan manapun. Pada tingkatan masyarakat dan *grass root* (akar rumput) Vietnam telah memiliki konsepsi yang telah diusung sejak lama, bahkan telah menjadi bagian dari pandangan hidup dan budaya dari Vietnam yang dikenal dengan *Bamboo Diplomacy*. Diplomasi ini menjadi simbol dari integritas, kesetiaan dan perlawanan. (Kumar and Kurian 2024)

Bui Thanh Son yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Vietnam menyatakan bahwa Bamboo Diplomacy masih menjadi semangat atas kebijakan luar negeri Vietnam yang berupaya menghindari perseteruan, serta menjaga

konsistensi dan kesetiaan dalam memajukan negara. Selengkapnya mengenai hal ini Bui Thanh Son menyatakan bahwa :

“...Neutrality of foreign policy is part of Vietnam's political pragmatism to realize national interests, as well as a manifestation of the country's role in supporting world peace and peace. Vietnam has never been involved in repressive actions against other countries and with Bamboo Diplomacy will establish relations with world countries in a wide scope.”(Giang 2024)

Pernyataan Menteri Luar Negeri Vietnam menunjukkan bahwa netralitas kebijakan luar negeri merupakan bagian dari pragmatisme politik Vietnam untuk mewujudkan kepentingan nasional, sekaligus sebagai wujud peran negara dalam mendukung perdamaian dan ketertiban dunia. Vietnam tidak pernah terlibat dalam tindakan represif atas negara lain dan dengan Bamboo Diplomacy akan menjalin hubungan dengan negara-negara dunia dalam lingkup yang luas. Netralitas ini akan menjadikan Vietnam sebagai negara yang berupaya menghindari konflik dan mengembangkan kerja sama yang lebih luas dengan berbagai negara dunia.

Strategi tidak memihak Vietnam dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan juga diaktualisasikan melalui pengembangan kerjasama secara komprehensif dengan beberapa negara maju. Sejak tahun 2020, Vietnam telah menjalankan kerjasama dengan 191 negara dunia, termasuk Palestina dan Republik Sahrawi. Pengembangan kerjasama dengan banyak negara ini memang menjadi perjalanan panjang karena pasca Perang Vietnam tahun 1975 Vietnam berupaya menolak hegemoni Barat, namun beberapa dekade kemudian pada tahun 1990 orientasi politik dan kerjasama luar negeri Vietnam mengalami pergeseran menjadi pragmatis dan negara-negara yang menjadi obyek kerjasama bukan hanya negara-

negara Timur dalam kerangka dogmatis, namun juga negara-negara di berbagai negara dunia dalam kerangka pragmatisme politik untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional.(Hiep and Tsvtov 2018)

Amerika Serikat dan Uni Eropa merupakan dua kekuatan besar yang menjadi mitra kerjasama Vietnam. Hubungan kerjasama Vietnam-Amerika Serikat terjalin pada tahun 1990, ketika negara adikuasa ini dipimpin Presiden Bill Clinton yang berhasil mengunjungi ibukota Vietnam, Hanoi sejak tahun 1975. *Event* kenegaraan ini sekaligus menjadi normalisasi hubungan kedua negara dan terus berlangsung hingga akhir dekade 2020. Beberapa pencapaian atas kerjasama kedua negara dapat dilihat dari neraca perdagangan Vietnam ke Amerika Serikat yang mencapai 3,7 milyar US Dollar tahun 2010 dan kemudian meningkat menjadi 7,1 milyar US Dollar tahun 2015 dan kemudian kembali meningkat menjadi 10,0 milyar US Dollar pada tahun 2020.(The US Census 2024) Selain pada bidang ekonomi kerjasama Vietnam-Amerika Serikat pertahanan, transportasi dan lain-lainnya.(The US Census 2024)

Mitra kerja sama Vietnam selanjutnya yaitu Uni Eropa. Kerja sama ini dibuka pada tahun 1990 yang ditandai dengan dibukanya kerja sama diplomatik antara Vietnam dan EEC (*European Economic Community*). Perkembangan kerjasama kedua pihak mengalami pencapaian penting ketika, Vietnam dan Uni Eropa berhasil agenda perdagangan bebas (*free trade agreement*) pada 30 Juni 2019. Selain itu, pada 20 Februari 2020 Vietnam dan Uni Eropa juga berhasil

mengembangkan dan meratifikasi EVFTA (*European-Vietnam Free Trade Agreement*). (Vietnam News 2024)

Dinamika politik luar negeri Vietnam yang berhasil mengembangkan kerjasama Strategi untuk netral tidak memihak kepada berbagai negara dunia, termasuk negeri-negeri maju. Upaya ini dijalankan melalui sikap kepemimpinan Vietnam untuk menunjukkan bahwa negara ini tidak terikat dan dekat dengan salah satu negara. Dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dijalankan melalui beberapa tindakan, meliputi :

1. Sikap pemimpin yang menyatakan bahwa Vietnam secara konsisten akan menjaga perdamaian dalam lingkup regional dan internasional, Hal ini tercermin dalam pernyataan Presiden Vietnam To Lam pada sidang nasional Vietnam tanggal 8 Maret 2024 yang menyatakan pada sengketa Laut Tiongkok Selatan Vietnam tidak memihak atau akan netral dan menghindari tindakan-tindakan provokatif yang menyebabkan pecahnya konflik berskala besar. (Vietnam Law and Legal Forum 2024)
2. Kebijakan luar negeri, Kementerian Luar Negeri Vietnam yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Vietnam, Bui Thanh Son pada Sidan UNSC (*United Nations Security Council*) di Geneva, Swiss pada tanggal 9 April 2021. Dalam event internasional tersebut, Pemerintah Vietnam akan bersikap netral terhadap sengketa Laut Tiongkok Selatan dan ketika kondisi berkembang secara genting, maka Pemerintah Vietnam akan

menyerahkannya ke UNSC sesuai dengan kaidah internasional. (Vietnam News 2021)

Berbagai kerja sama internasional Vietnam di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan menunjukkan bahwa orientasi kebijakan luar negeri ini terus berjalan tanpa banyak terganggu oleh dinamika dan spektrum konflik perairan tersebut. Di sisi lain, dalam perkembangan kerjasama multilateral yang terjalin dengan berbagai negara dunia, termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat dan berbagai negara lainnya, Vietnam juga tetap berhasil mengembangkan kerja sama dengan Tiongkok di berbagai bidang pada dekade 2020.

Pada tahun 2021 hingga 2023 hubungan ekonomi antara Vietnam dan Tiongkok mengalami peningkatan secara drastis yang ditandai dengan meningkatnya ratifikasi dokumen kerja sama. Gambaran tentang hal ini lihat tabel 3.3. sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Perkembangan kerja Sama Ekonomi Vietnam dan Tiongkok
Periode 2014-2023

No	Periode	Jumlah	Keterangan
1.	2014	2	Ratifikasi dua proyek kerjasama investasi di bidang energi dan pembangunan kilang Haiyang.
2.	2015	2	Pengembangan <i>comprehensive economic cooperations</i> bersamaan dengan tercapainya 32,1 milyar US Dollar dan pengembangan bibit pertanian.
3.	2016	2	Kerjasama investasi (FDI) sebesar 200 milyar US Dollar, kerjasama bidang maritim dan pengembangan zona perbatasan Ban Gioc Detian.
4.	2017	3	Kerjasama investasi (FDI), pengembangan kerjasama regional dan program <i>two corridor and one economic system</i> .
5.	2018	12	Kerjasama infrastruktur, investasi, perdagangan dan alih teknologi.
6.	2019	2	-
7.	2020	3	Kerjasama peningkatan kerjasama perdagangan, program RCEP (<i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>) dan Implementasi <i>China+1 Strategy</i> .
8.	2021	8	Pengembangan kerja sama di bidang perdagangan luar negeri, engineering, pertambangan, kemaritiman, pariwisata dan teknologi.
9.	2022	24	-
10.	2023	36	Pengembangan kerja sama di bidang perdagangan luar negeri, engineering, pertambangan, kemaritiman, pariwisata dan teknologi, energi terbarukan, pendidikan, pengembangan alutsista dan pembangunan infrastruktur.

Sumber : Diolah dari Vietnam Plus 2024

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa dalam kurun waktu tiga tahun hubungan ekonomi antara Vietnam dan Tiongkok mengalami peningkatan. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa kerja sama ekonomi tersebut mengalami diversifikasi hingga ke bidang-bidang yang sebelumnya tidak dibahas oleh kedua

negara. Kedekatan ini menjadi strategi untuk meminimalkan resiko terjadinya konflik secara terbuka karena masing-masing pihak, baik Vietnam ataupun Tiongkok memiliki kepentingan untuk saling melengkapi di antara keduanya.

3.2. Strategi Meminimalkan Resiko Vietnam Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Strategi meminimalkan resiko merupakan keputusan yang dijalankan secara sistematis dengan melibatkan berbagai entitas dan institusi untuk menghindari kemungkinan terburuk. Dalam meminimalkan resiko beberapa strategi yang umum dijalankan meliputi manajemen dan tata kelola sistem pertahanan atau sistem persenjataan, mobilisasi masyarakat hingga manajemen sikap kepemimpinan agar tidak memicu konflik yang lebih luas.

Strategi meminimalkan resiko merupakan inisiatif yang dijalankan suatu negara sebagai langkah pre-emptif agar konflik dapat diminimalisir atau ditekan agar tidak eskalasinya tidak meluas. Pada umumnya strategi ini dijalankan dengan mengajak pihak-pihak yang terlibat konflik untuk berdiskusi atau dapat juga dengan mengajak pihak-pihak lainnya untuk mencari solusi bersama, solusi sementara, solusi dalam kerangka win-win, solusi mendasar ataupun bentuk-bentuk solusi lainnya. Strategi meminimalkan resiko menjadi hal yang rasional karena menurut Gregory B. Polling seorang analisis konflik dan pemerhati masalah keamanan Asia dari Universitas Oxford menyatakan bahwa :

“...The South China Sea conflict for almost seventy years has indeed formed a unique pattern. This long dispute has hardly triggered an open war, let alone using full force, but whether consciously or not, this conflict has drained the energy of East Asian and South Asian countries. Various talks and lobbying are important, and can even reconcile the conflict, but for China this effort is a new chapter in building cooperation with countries in the two regions.”(Polling 2022)

Pernyataan Gregory B. Polling menunjukkan bahwa konflik Laut Tiongkok Selatan selama hampir dari tujuh puluh tahun memang membentuk pola yang unik. Sengketa panjang ini hampir tidak memicu perang secara terbuka apalagi menggunakan kekuatan penuh, namun disadari atau tidak konflik ini telah menguras energi dari negara-negara Asia Timur dan Asia Selatan. Berbagai pembicaraan dan lobi menjadi penting, bahkan dapat mendamaikan konflik, namun bagi Tiongkok upaya ini menjadi babak baru untuk membangun kerjasama dengan negara di dua wilayah tersebut.

Dikaitkan dengan analisis resiko maka bagi Vietnam konflik Laut Tiongkok Selatan maka potensi terburuk atas sengketa ini adalah konflik secara terbuka dan dikaitkan dengan analisis resiko ini kemungkinan ini justru sangat kecil terjadi. Kemudian analisa resiko atas hasil dampak terbesar adalah pemutusan hubungan diplomatik hingga penerapan sanksi ekonomi-keamanan. Fakta ini mendasari Pemerintah Vietnam untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan luar negeri yang sesuai dengan memperhatikan beberapa beberapa aspek, yaitu pencapaian kepentingan nasional, sumber daya militer dan pertahanan secara proporsional, konstelasi regional, serta kapabilitas Tiongkok sebagai ancaman sebagai negara yang hampir tidak pernah terlibat dalam konflik secara terbuka dalam skala besar.

Strategi meminimalkan resiko yang dijalankan Pemerintah Vietnam dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dijalankan dengan membangun hubungan kerja sama dengan Tiongkok. Strategi ini merupakan menjadi bagian dari rekonsiliasi konflik untuk dapat saling melengkapi diantara keduanya, meskipun berada di tengah-tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan yang belum kunjung terselesaikan secara permanen. Hal ini ditandai dengan kunjungan tingkat Menteri Tiongkok ke Vietnam, yaitu Menteri Luar Negeri Tiongkok Lan Foan untuk membahas kerja sama ekonomi dan manufaktur. Kemudian hal ini ditindaklanjuti dengan kunjungan Menteri Perencanaan dan Investasi Vietnam, Nguyen Ci Dung. (Vietnam Plus 2024)

Pada tahun 2023 hubungan Vietnam dan Tiongkok mengalami peningkatan. Kondisi ini kemudian mendorong pejabat tertinggi kedua negara yaitu Presiden Xi Jinping ke Hanoi Vietnam untuk membentuk konsorsium ekonomi-politik kedua negara. Pertemuan ini menjadi langkah strategis bahwa di tengah eskalasi sengketa yang tidak menentu kedua negara tetap dapat membangun hubungan baik yang sekaligus membuktikan bahwa eskalasi sengketa Laut Tiongkok Selatan dapat dikendalikan di tengah hubungan kerjasama ekonomi, perdagangan dan ekonomi-politik kedua negara yang berjalan secara progresif melalui persamaan visi kedua pemimpin kedua negara. Gambaran tentang hal ini lihat gambar 3.1. sebagai berikut :

Gambar 3.1.

Forum Bilateral Pemimpin Vietnam dan Tiongkok Tahun 2023



Sumber : Diolah dari Vietnam Plus 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam pertemuan tersebut pemimpin kedua negara, yaitu Presiden Tiongkok, Xi Jinping dan Presiden Vietnam, Vo Van Thuong menjadi fasilitator secara politik bagi kedua negara untuk membangun kedekatan dalam aspek politik. Kemudian kedekatan hubungan ini akan ditindaklanjuti dengan inisiatif para pejabat teknis untuk mengembangkan kerja sama multi sektor antara Vietnam dan Tiongkok. Fakta ini mampu mempengaruhi Vietnam untuk memilih mendekat dengan Tiongkok, meskipun perkembangan sengketa Laut Tiongkok Selatan belum sepenuhnya terselesaikan.

Di samping menjalin relasi yang erat dengan Tiongkok dalam berbagai sektor, Vietnam juga secara simultan membangun poros kerja sama dengan negara-

negara besar lainnya, terutama Amerika Serikat, sebagai bentuk upaya untuk menguatkan daya tawar strategisnya dalam konteks Laut Cina Selatan. Meskipun tidak terikat pada aliansi militer formal, kedua negara telah sejak awal dekade 2010-an mengembangkan komunikasi dan koordinasi pertahanan melalui forum seperti *Defense Policy Dialogue* serta skema *Maritime Security Initiative*. Eskalasi hubungan bilateral ini mencapai tahap penting pada September 2023, ketika Vietnam dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan hubungan menjadi *Comprehensive Strategic Partnership*, suatu status diplomatik tertinggi yang merefleksikan kesepahaman dalam kepentingan strategis jangka panjang di bidang pertahanan, perdagangan, serta kestabilan kawasan (U.S. Embassy Hanoi 2023).

Dalam kerangka peningkatan kapasitas maritim, Amerika Serikat memberikan dukungan konkret melalui penyediaan perlengkapan pertahanan, pelatihan operasional, dan penguatan institusi maritim Vietnam. Sejak 2017 hingga 2023, pemerintah AS telah menyerahkan sejumlah kapal patroli bekas kelas Hamilton kepada Penjaga Pantai Vietnam guna memperkuat kehadiran maritim di perairan ZEE yang rawan pelanggaran oleh kapal-kapal asing, terutama dari Tiongkok (Fulcrum, 2023). Penerapan kerja sama ini turut ditandai dengan kunjungan pelabuhan oleh kapal militer Amerika Serikat, seperti USS Blue Ridge dan USCGC Waesche, ke pangkalan Cam Ranh pada pertengahan 2023—sebuah langkah simbolik sekaligus fungsional yang menggarisbawahi keseriusan kedua negara dalam membangun sinergi keamanan kawasan (U.S. Department of Defense 2024).

Selain dukungan praktis di sektor pertahanan, Amerika Serikat juga memainkan peran sebagai mitra diplomatik yang aktif dalam mendukung posisi Vietnam terhadap klaim ekspansif Tiongkok di Laut Cina Selatan. Dalam pernyataan resminya pada Juli 2020, Departemen Luar Negeri AS secara tegas menolak validitas hukum dari konsep “Nine Dash Line” dan menyuarakan dukungan terhadap negara-negara Asia Tenggara yang menghadapi tantangan serupa, dengan merujuk pada prinsip-prinsip UNCLOS 1982 sebagai landasan hukum internasional (CFR, 2020). Dukungan normatif ini memperkuat posisi internasional Vietnam, sekaligus menjadi sarana mitigasi risiko apabila eskalasi sengketa mencapai titik konfrontatif.

Strategi diplomatik Vietnam dalam memanfaatkan hubungan dengan Amerika Serikat, tanpa menyatakan keberpihakan penuh terhadap kekuatan Barat, mencerminkan pendekatan hedging yang adaptif. Vietnam memosisikan dirinya sebagai aktor independen yang tetap menjaga pluralitas hubungan eksternal, sembari memastikan keberlangsungan stabilitas nasional di tengah tekanan geopolitik dari Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama dengan Amerika Serikat bukan semata strategi aliansi, melainkan kalkulasi politik untuk meminimalkan ketergantungan dan memperluas opsi strategis di tengah dinamika Laut Cina Selatan yang penuh ketidakpastian.

3.3. Strategi Oposisi Hegemoni Vietnam Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Strategi oposisi hegemoni atau yang selengkapnya disebut dengan kebijakan untuk mempertahankan sikap yang saling berlawanan atau *All available instruments pursued in an opposite and mutually counteractive* sebagai sarana utama. Konsepsi ini dapat diartikan bahwa tindakan untuk mengembangkan sikap yang berlawanan agar suatu negara tidak terseret dalam spektrum konflik. Berbagai kebijakan ini umumnya dijalankan dengan menjaga performa pertahanan, ekonomi ataupun berbagai kekuatan yang ada untuk menjaga posisi tawar (*bargain position*) terhadap negara-negara yang menjadi oponent konflik.

Strategi meminimalkan resiko yang dijalankan Pemerintah Vietnam dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dijalankan melalui pengembangan kerja sama yang lebih luas dengan menjadikan ASEAN sebagai forum bersama untuk menindaklanjuti kekuatan Tiongkok sebagai ancaman, berkaitan dengan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Kerja sama luar negeri Vietnam dan ASEAN memiliki peranan penting untuk meningkatkan kapabilitas sektor pertahanan suatu negara sedara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan kerja sama dapat melengkapi kebutuhan antara satu negara dengan negara lainnya, serta mempercepat pencapaian berbagai hal yang telah ditentukan sebelumnya. Kerja sama luar negeri menjadi respon penting ASEAN dalam menangani agresivitas Tiongkok dalam program peningkatan sebagai strategi agar persoalan ini menjadi permasalahan bersama diantara negara-negara ASEAN. Kerjasama Vietnam dan ASEAN jika

dikaitkan dengan Konseo Hedging maka ini menjadi hal yang rasional karena Vietnam akan menjadikan ini sebagai upaya membangun kekuatan kolektif yang lebih besar sehingga Tiongkok akan mengeliminasi kebijakannya untuk terus bersikap agresif dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan tersebut.

Kerja sama luar negeri Vietnam dan ASEAN menjadi hal yang relevan untuk dijalankan untuk menindaklanjuti peningkatan persenjataan Tiongkok karena adanya beberapa alasan, pertama, kapabilitas pertahanan negara-negara ASEAN cenderung memiliki karakter yang sama, yaitu bidang pertahanan yang menengah-bawah, kedua, negara-negara ASEAN sama-sama berada pada persaingan antara dua negara besar yaitu Amerika Serikat dan sekutu pendukungnya melawan Tiongkok bersama dengan aliansi pendukungnya dan ketiga, kerja sama bidang pertahanan telah menjadi kebiasaan negara-negara ASEAN, khususnya berkaitan dengan ASC (*Asean Security Community*). (RSIS 2021)

Kerja sama ASEAN dan negara-negara Asia Tenggara dalam menangani agresivitas Tiongkok berkaitan dengan sengketa Laut Tiongkok Selatan ini dijalankan melalui beberapa kasus kerja sama, diantaranya kerjasama ASEAN dan Vietnam dalam membangun stabilitas keamanan kawasan, termasuk dalam mengatasi sengketa Laut Tiongkok Selatan yang masih belum terselesaikan. Kerjasama ini bertajuk pertemuan ADMM (*ASEAN Defense Minister Meeting*) yang diselenggarakan pada 28 Oktober 2014. Agenda ini diselenggarakan di Hanoi, Vietnam sebagai upaya membangun kebijakan dan antisipasi kolektif terhadap agresivitas Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. (ARF Outlook, 2014)

Kerja sama multilateral ASEAN antara Vietnam, Indonesia, Malaysia dan Filipina pada Juni 2019 melalui pengamanan wilayah laut bersama. Kerjasama ini direncanakan akan dijalankan secara periodik setiap bulannya yang akan dievaluasi secara terus-menerus. Kerja sama ini merupakan kesepakatan menteri pertahanan dari ketiga negara pada pertemuan di Hotel Shangri La, Singapura pada 4 Juni 2019. Ketiga pihak sepakat melakukan patroli pengamanan wilayah perairan di Selat Melaka hingga wilayah Laut Filipina untuk mengamankan wilayah dari penyelundupan, trafficking hingga mengatasi kapal Tiongkok yang masuk ke wilayah perairan negara-negara tersebut. Selain itu, terdapat juga bentuk kerja sama multilateral antara Vietnam, Indonesia dan Filipina dalam DCA (*Defense Cooperation Agreement*) yang dinasionalisasi pada tahun 2020. Dalam kerja sama ini kedua negara sepakat untuk menjadikan wilayah udara dan perairan Indonesia sebagai wilayah pengamanan bersama. Dengan demikian nantinya melalui koordinasi yang komprehensif militer Indonesia dan Singapura dapat keluar masuk wilayah masing-masing negara untuk dapat mengamankan wilayah dari kapal atau pesawat asing, termasuk kapal-kapal dari Tiongkok.

Strategi oposisi hegemoni dijalankan melalui kerja sama multilateral ASEAN antara, Vietnam Indonesia dan Brunei Darussalam dalam JDCC (*Joint Defense Cooperations Committe*) pada tahun 2016-2020. Kerja sama ini merupakan bagian dari kesepakatan MoU (*Memorandum of Understanding*) kedua negara untuk mencapai kesepakatan di bidang pertahanan meliputi pengadaan alutsista, latihan bersama dan pengembangan potensi militer bersama. Dalam kerja sama ini kedua belah pihak sepakat untuk mengamankan wilayah perairan ZEE dari kapal-

kapal Tiongkok yang masuk ke wilayah kedaulatan kedua negara. Selain itu, terdapat juga kerja sama multilateral; antara Vietnam, Malaysia dan Thailand dalam pengembangan dalam program ADIC (*ASEAN Defense Industry Collaborations*) pada tahun 2019 dan kemudian melibatkan Indonesia dan Vietnam pada tahun 2020. kerja sama ini dijalankan sebagai solusi dalam membangun kemandirian negara-negara ASEAN atas persenjataan-persenjataan yang nantinya dapat meningkatkan *bargain position* negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia dan Thailand terhadap agresivitas Tiongkok dalam meningkatkan persenjataannya.(Vietnam Plus 2022)

Strategi oposisi hegemoni yang dijalankan Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan bagian dari Konsep Hedging untuk membangun kekuatan kolektif. Hal ini tidak semata-mata sebagai bentuk manuver untuk mengejar kapabilitas militer Tiongkok. Namun lebih pada upaya Vietnam dengan menggunakan patner kerjasama untuk dapat mengontrol kepentingan Tiongkok pada negara-negara tersebut sehingga dapat memperjuangkan rekonsiliasi sengketa Laut Tiongkok Selatan agar nantinya tidak membesar dan dapat mengganggu stabilitas keamanan regional. Berbagai forum yang diikuti oleh pemerintah Vietnam juga diorientasikan untuk membangun kesiapan politik keamanan dengan lebih baik yang meskipun belum menandingi kekuatan pertahanan Tiongkok, namun upaya ini akan lebih langkah konkrit untuk mendukung kesiapan Vietnam dalam mengantisipasi kemungkinan terburuk.

3.4. Strategi Adaptasi Terhadap Ketidakpastian Vietnam Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Strategi adaptasi terhadap ketidakpastian merupakan bentuk kebijakan, baik secara tekstual ataupun non-tekstual dalam mempersiapkan sumber data yang ada yang dimiliki oleh negara tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk atas konflik tersebut. Strategi ini dijalankan melalui beberapa tindakan, meliputi menjaga kesiapan angkatan bersenjata untuk melindungi berbagai kepentingan negara tersebut dalam situasi maupun kondisi terburuk.

Strategi meminimalkan resiko yang dijalankan Pemerintah Vietnam dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dijalankan dengan pengembangan sistem pertahanan dan persenjataan yang ditujukan untuk mengantisipasi ancaman dari wilayah perairan. Kebijakan ini, masing-masing yaitu kebijakan pertahanan Vietnam melalui strategi “all people defense”. Terobosan ini dikembangkan pada bulan Oktober 2014 yang berisi tiga ketentuan, pertama partisipasi dan keterlibatan elemen-elemen non-organik diantaranya pelajar tingkat atas, personel cadangan dan lain-lainnya, kedua, partisipasi dalam operasi perdamaian internasional dan ketiga, modernisasi bidang persenjataan dan sumber daya manusia. (MoD Defense Vietnam 2019)

Strategi adaptasi pemerintah Vietnam lainnya dijalankan melalui rasionalisasi kebijakan pertahanan Vietnam pada awal bulan Februari 2015 yaitu kebijakan keamanan maritime (maritime security) dan kerjasama internasional. Dua rasionalisasi kebijakan ini dijalankan oleh Kementerian Pertahanan Vietnam

melalui beberapa strategi teknis kerjasama internasional multilateral, pengembangan teknologi, inovasi dan pengembangan sumber daya manusia.(Vietnam Law Magazine 2023) Selain itu, terdapat juga kebijakan pengadaan kapal perang kelas *freigate* dari Rusia pada tahun 2016. Kapal ini menjadi ujung tombak pengamanan wilayah perairan ketika terjadi situasi darurat akibat sengketa Laut Tiongkok Selatan. Armada laut Vietnam ini dipusatkan ke beberapa wilayah komando angkatan laut Vietnam yang berada di Nohan Trach dan Cam Ranh. (Global Data 2022)

Strategi adaptasi pemerintah Vietnam melalui pengembangan kebijakan pertahanan pengamanan perbatasan pada tahun 2019/2020 melalui strategi pengembangan zona pertahanan nasional (National Defense Zone). Gagasan ini dicanangkan pada tanggal 12 November 2019 dan kemudian kembali dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan Vietnam di bawah kepemimpinan Letnan Jenderal Nguyen Tan Cuong. (Communist Review 2025) Kemudian terdapat juga upaya peningkatan anggaran pertahanan Vietnam dari tahun 2020/2021 ke 2021/2022 sebesar 4,5%. Anggaran ini 5,8 milyar US Dollar. Sebagian besar anggaran ini ditujukan untuk memperkuat sistem pertahanan moderen yang di orientasikan ke wilayah udara dan perairan. (Global Data 2022). Selain itu, terdapat upaya dalam pengembangan kerjasama dengan Jepang untuk membangun kekuatan keamanan alternatif. Kerjasama ini dirumuskan melalui pertemuan Menteri Pertahanan Jepang, Minoru Kihara dan Perdana Menteri Vietnam Phan Van Giang pada 6 Agustus 2024. Pertemuan ini membicarakan

beberapa persoalan penting meliputi kerjasama pelatihan, pertukaran teknologi, bantuan peralatan dan keamanan siber.(VoA Indonesia 2024)

Strategi menghadapi ketidakpastian di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan juga dijalankan Vietnam dengan memperkuat kerjasama ekonomi dalam kerangka AEC (*Asean Economic Community*). Kerjasama dirintis pada tahun 2015 yang ditujukan pemerintah Vietnam untuk memperkuat investasi, akses ke tenaga terampil dan integrasi terhadap perekonomian global. Pengembangan kerjasama ini dapat mengembangkan kerangka kerjasama ekonomi baru, diantaranya dengan Singapura yang pada tahun 2024 nilai investasinya mencapai 9,14 miliar US Dollar. Selain itu, pencapaian lainnya juga berhasil dicapai Vietnam melalui kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan yang pada tahun 2024 mencapai 3,89 miliar US Dollar.(Vietnam Briefing 2024) Pengembangan kerjasama ekonomi ini menjadi strategi Vietnam untuk menghadapi kondisi ketidakpastian dinamika ekonomi-politik dan pertahanan, berkaitan dengan ketergantungan Vietnam terhadap Tiongkok yang cukup besar sehingga di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan yang terkadang diwarnai dengan ketidakpastian Pemerintah Vietnam tetap dapat menjaga *bargain position*-nya.

Kebijakan pertahanan dan militer yang kemudian di dukung dengan strategi kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara alternatif sebagai bagian dari strategi meminimalkan resiko yang dijalankan Pemerintah Vietnam dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan upaya mengantisipasi sengketa Laut Tiongkok Selatan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Meskipun kekuatan

militer antara Vietnam dan Tiongkok cukup jauh berbeda, namun dikaitkan dengan potensi ancaman, maka strategi adaptasi ini setidaknya dapat mengamankan wilayah kedaulatan perairan Vietnam.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Melalui uraian pembahasan bab-bab sebelumnya disimpulkan bahwa sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan konflik yang telah menjadi bagian dari sejarah klasik dan moderen. Konflik ini semakin mengemuka bersamaan dengan dengan kemajuan Tiongkok di berbagai bidang, khususnya ekonomi dan militer. Pencapaian dari kemajuan ini mendorong Tiongkok untuk mengembangkan hegemoninya termasuk mengembalikan wilayah yang menjadi imperiumnya yang masuk dalam kawasan *Nine Dash Line*. Akibatnya sengketa Laut Tiongkok Selatan berdampak pada memanasnya hubungan Tiongkok dengan negara-negara yang memiliki akses ke wilayah perairan tersebut, diantaranya Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia dan beberapa negara lainnta, termasuk Vietnam.

Vietnam merupakan negara yang terdampak secara langsung terhadap sengketa Laut Tiongkok Selatan. Hal ini tidak lepas dari posisi geo-politik Vietnam yang berbatasan secara langsung dengan wilayah perairan ini. Berkembangnya sengketa Laut Tiongkok Selatan mendorong Pemerintah Vietnam untuk menjalankan berbagai upaya dalam menghadapi Tiongkok di tengah sengketa Laut Tiongkok Selatan, masing-masing yaitu :

- a. Strategi untuk tidak memihak dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dijalankan Pemerintah Vietnam melalui beberapa strategi diantaranya kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada perdamaian dan penyelesaian persoalan secara win-win solution dengan berbagai negara yang memiliki

akses ke wilayah perairan, diantaranya *Bamboo Diplomacy* dengan membangun kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan dengan Tiongkok. Selain itu, strategi untuk tidak memihak dijalankan Pemerintah Vietnam melalui sikap pemimpin negara ini di beberapa forum internasional tentang arti penting perdamaian dan stabilitas regional, serta membangun kerjasama dengan negara-negara dunia termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

- b. Strategi meminimalkan resiko Vietnam dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dijalankan Pemerintah Vietnam melalui pengembangan kerjasama dengan Pemerintah Tiongkok dengan tanpa menyinggung persoalan sengketa Laut Tiongkok Selatan, diantaranya kerjasama luar negeri dan pertemuan antar kepala negara sehingga strategi ini akan meredam ketegangan antara Vietnam dan Tiongkok. Selain itu, Vietnam juga mengembangkan kerjasama dengan Amerika Serikat yang di dalamnya terdapatnya kerjasama *Defense Policy Dialogue*, *Maritime Security Initiative* dan *Comprehensive Strategic Partnership*.
- c. Strategi oposisi hegemoni Vietnam dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan dijalankan Pemerintah Vietnam agar tetap memiliki sikap nyata dalam sengketa tersebut sehingga Vietnam tetap dapat mempertahankan kepentingan nasionalnya, yaitu kedaulatan wilayah. Oposisi hegemoni ini dijalankan melalui jalur diplomasi internasional dengan memegang tegus prinsip batas laut dengan mengikutsertakan peran ASEAN melalui beberapa pertemuan, diantaranya ADMM (ASEAN Defense Minister

Meeting), DCA (*Defense Cooperation Agreement*) dan ADIC (*ASEAN Defense Industry Collaborations*)

- d. Strategi adaptasi terhadap ketidakpastian dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan dijalankan Pemerintah Vietnam dengan menyiagakan sistem pertahanan-keamanan secara komprehensif, termasuk di dalamnya mengembangkan sistem modernisasi alutsista dan mobilisasi pasukan untuk menghadapi situasi dan kondisi darurat tas sengketa perairan tersebut. Beberapa kebijakan ini meliputi “all people defense”, kebijakan keamanan maritime (maritime security), pengadaan kapal perang kelas *freigate* hingga rasionalisasi anggaran pertahanan.

4.2. Saran

Melalui penelitian ini maka dapat diajukan saran kepada para pemangku hubungan internasional dan akademisi program studi hubungan internasional, masing-masing yaitu :

- a. Kepada para pemangku hubungan internasional melalui penelitian ini peneliti dapat memberikan saran bahwa diperlukan formulai kebijakan luar negeri yang efektif sehingga tetap dapat menjaga hubungan baik dengan Tiongkok sebagai negara adikuasa baru sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan militer terbesar di dunia, namun ternyata cenderung tidak terlibat konflik secara terbuka.
- b. Kepada para akademisi hubungan internasional melalui penelitian ini peneliti dapat memberikan saran bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut

tentang perkembangan sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan negara lain, diantaranya Malaysia, Indonesia ataupun negara lainnya sehingga dapat menjadi bentuk perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, Graham T. 1971. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little Brown Company.
- ARF Outlook, 2014, "ASEAN Regional Forum : Annual Security Outlook", <https://aseanregionalforum.asean.org/wp-content/uploads/2019/01/ARF-Annual-Security-Outlook-2014.pdf>
- Ariansah, F., Malik, F. A., Saphira, M., Erviana, V., & Antoni, H. (n.d.). Konflik Antara china dengan vietnam atas laut China Selatan berdasarkan Perspektif Hukum laut internasional. *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v6i2.518-528>
- Asia Times, 2018, "Mahathir Draws New Line of South China Sea Disputes", <https://asiatimes.com/2018/09/mahathir-draws-new-line-in-the-south-china-sea/>
- Antara News, 2023, "Xi Jinping : Kunjungan ke Vietnam Puncak diplomatik China 2023", <https://www.antaraneews.com/berita/3870981/xi-jinping-kunjungan-ke-vietnam-puncak-diplomatik-china-pada-2023>
- Antara News, (2023), "China-Vietnam Sepakat Upayakan Penyelesaian Langgeng Sengketa Maritim", <https://www.antaraneews.com/berita/3871038/china-vietnam-sepakat-upayakan-penyelesaian-langgeng-sengketa-maritim>
- Atkinson, Joshua D. 2017. "Qualitative Approaches." *Journey into Social Activism*.
- Axelrod, Axel, (2013), *The Real History of Vietnam War : A New Look The Past*, London and New York : Sterling Publishing.
- BBC. 2020. "A quick guide to the US-China trade war." BBC. <https://www.bbc.com/news/business-45899310>.
- BBC News, 2023, "What is South China Sea Disputes", <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349>
- Womack, Brantly, 2006, *China and Vietnam : Politic of Assymetry*, London and New York : Cambridge University Press.
- Center, P. Y., & here, P. enter your name. (2022, February 10). *Purnomo Yusgiantoro center*. The Purnomo Yusgiantoro Center. <https://www.purnomoyusgiantorocenter.org/the-importance-of-the-south-china-sea-energy-perspective/>
- CFR, 2022, "China Mark South China Sea Claims", <https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes>
- China Briefing. 2024. "China-Vietnam Relations : Trade and Investing", <https://www.china-briefing.com/news/china-vietnam-relations-trade-dynamics-and-investment-outlook/>
- China Briefing, 2025, "China Manufacture Presence in Growth Vietnam : Location and Future Growth", <https://www.vietnam-briefing.com/news/china-manufacturing-presence-vietnam-locations-future-growth.html/>

- Chwee-Kuik, Cheng, “How Do Weaker States Hedge? Unpacking ASEAN States Alignment Behavior Toward China”, *Journal of Contemporary China*, Routledge Publishing, March 3, 2016.
- Communist Review, 2025, “strengthening Vietnam Defense Potential and Posture under The Guidance of the 13 Party Congress”, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/english/focus/detail/-/asset_publisher/FMhwM2oQCZEZ/content/
- Cuong, Nguyen X., and Nguyen T. Hoa. 2018. “Achievements and Problems in Vietnam: China Relations from 1991 to the Present.” In *China Report*, 306–324. N.p.: Sage Publications.
- Giang, Nguyen Kach, (2024), “Bamboo in the Wind : Vietnam Quest For Neutrality”, <https://www.e-ir.info/2024/07/12/bamboo-in-the-wind-vietnams-quest-for-neutrality/>
- Global Data, (2022), “Vietnam Defense Market”, <https://www.globaldata.com/data-insights/aerospace-and-defence/vietnam-defense-market-budget-assessment-and-drivers-2022/#:~:text=>
- Hiep, Le Hong and Anton Tsvetov, (2018), *Vietnam Foreign Policy Under Moi*, London : ISEAS
- Hoa, Nguyen T., and Nguyen X. Cuong. 2020. “Looking Back on Vietnam-China Relations Since The Establishment of Strategic Cooperative Partnership.” *The Russian Journal of Vietnamese Studies* 4.
- Hongbin, D., & Ullah, I. (2022). THE SOUTH CHINA SEA’S NINE DASH LINE: KEY DISPUTES AND CHINA’S HISTORICAL RIGHTS CLAIMS. *Journal of Pakistan-China Studies (JPCS)*, 3(1), 67–86. <https://doi.org/10.55733/jpcs.v3i1.53>
- Hung Vo Minh, Lee Hong Kiet, et, all, “The India, Vietnam, China Geopolitical Triangle and Vietnam Measures to Navigates The Relationship From Two Level Game Theory”, *The Journal of Multidiciplinary Review*, Vol.1. July, 2024.
- Koichi Sato, “Chiiki Funso to ASEAN no Kino: Minamishinakai wo Meguru Kyocho to Tairitsu,” in *Tenkanki no ASEAN: Arata na Kadai eno Chosen*, ed. Susumu Yamakage, The Japan Institute of International Affairs, 2001, pp. 183-188.
- Kumar, Karantala Aresh and Rosemary Kurian, “Bamboo Diplomacy Amid Great Power Rivalry : The Case of Thailand and Vietnam”, *The Journal of Diplomatist*, Vol.VIII. No.3. Augustus 2024.
- Srinivasan, Krishnan and James Mayal, (2019), *Value in Foreign Policy : Investigation, Ideals and Interest*, London : Rowman and Littlefield Publishing.
- The Asian Foundation, “US, China and Southeast Asian Relations : Chalenges and Opportunities For Regional Cooperations”, *The Asian Foundation-Learnergy Cooperation of New York*, 2024.

- The US Census, (2024), “Trade Goods in Vietnam”, <https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5520.html>
- Malesky, Edmund, and Jonathan London. 2014. “The Political Economy of Development in China and Vietnam.” In *The Annual Review of Political Science*, 395–419. Vol. 17. N.p.: Annual Reviews.
- McDonnell, Stephen. 2021. “Mengapa Xi Jinping memimpin China kembali ke sosialisme.” BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58663220>.
- Mod Defense Vietnam, 2019, “Vietnam National Defense White Paper”, <https://mod.gov.vn/en/intro/vnd/sa-en-dod-dp/sa-en-dv-mf-stqp/31cc80d8-9f20-4cea-a224-8dd56db346c6>
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Metode Penelitian Kualitatif.
- OECD World. 2022. “China (CHN) and Vietnam (VNM) Trade | OECD.” The Observatory of Economic Complexity. <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/partner/vnm>.
- Panda, Ankit, and Sebastian Strangio. 2016. “Vietnam Protests as China Lands Civilian Aircraft on Newly Constructed Spratly Airstrip.” *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2016/01/vietnam-protests-as-china-lands-civilian-aircraft-on-newly-constructed-spratly-airstrip/>.
- Path, K. (2018), “The Duality of Vietnam’s Deference and Resistance to China”, *Diplomacy&Statecraft*, Volume: 29, Issue: 3, p. 499-521.
- Pearson, James, and Khanh Vu. 2019. “Vietnam, China embroiled in South China Sea standoff.” *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-vietnam-china-southchinasea-idUSKCN1UC0MX>.
- Pratama, G. G. (2016). Konflik versus kooperasi: Upaya Penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan Dan Integrasi ASEAN KE iklim ekonomi global. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(1), 24–42. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a2>
- Rahmawati, Adelia. 2022. “Rivalitas Tiongkok dan Jepang di Asia Tenggara.”
- Raine, Sarah, 2017, *Regional Disorder : The South China Sea Disputes*, London : IISS Publishing.
- Ross, Robert S. 2020. “China-Vietnamese Relations in the Era of Rising China: Power, Resistance, and Maritime Conflict.” *Journal of Contemporary China* 30, no. 130 (December): 613-629.
- Shoji, T. (2012). Vietnam, ASEAN, and the South China Sea: Unity or diverseness?. Vietnam, ASEAN, and the South China Sea: Unity or Diverseness? *. <https://www.semanticscholar.org/paper/Vietnam%2C-ASEAN%2C-and-the-South-China-Sea-%3A-Unity-or-Shoji/ec19f20b3557d4860fd5a9598bedc8e4af61007c>
- SIPRI, 2019, “Arms Flow on Southeast Asia”, <https://www.sipri.org/publications/2019/research-reports/arms-flows-south-east-asia>
- Sorongan, T. P. (2021, September 1). *Awas Panas! China Buat Aturan Sepihak di Laut China Selatan*. CNBC Indonesia. Retrieved February 25, 2022, from

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210901062901-4-272738/awas-panas-china-buat-aturan-sepihak-di-laut-china-selatan>
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- The Jakarta Post, 2018, “China Committed to Peacefull Settlement of South China Sea Disputes”, <https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/08/china-committed-to-peaceful-settlement-of-south-china-sea-disputes-chinese-prime-minister-says.html>
- Thu, Huong L. 2018. “Vietnam–China relations.” Indo-Pacific Defense Forum. <https://ipdefenseforum.com/2018/07/vietnam-china-relations/>.
- Thu, Huong L. 2020. “Rough Waters Ahead for Vietnam-China Relations.” Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/2020/09/30/rough-waters-ahead-for-vietnam-china-relations-pub-82826>.
- Thuy, Tran T. 2013. “Vietnam’s Relations with China and the US and the Role of ASEAN.” In *Security Outlook of the Asia Pacific Countries and Its Implications for the Defense Sector*. N.p.: National Institute for Defense Studies.
- Tran, Bich T., and Candice Chan. 2021. “Vietnam needs to do more to reduce trade dependence on China.” ThinkChina. <https://www.thinkchina.sg/vietnam-needs-do-more-reduce-trade-dependence-china>.
- Vietnam rebukes China, Philippines over South China Sea conduct. (Reuters, 2018). <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vietnam-rebukes-china-philippines-over-south-china-sea-conduct-2023-05-18/>
- BYJU,s, (2024), “South China Sea Disputes : UPSC International Relations Note”, <https://byjus.com/free-ias-prep/south-china-sea-dispute/>
- International Sindo, 2023, “4 Fakta Mengapa Budaya Vietnam Cenderung ke Asia Timur Daripada Asia Tenggara”, <https://international.sindonews.com/read/1100703/45/4-fakta-mengapa-budaya-vietnam-cenderung-ke-asia-timur-daripada-asia-tenggara-1684303557/20>
- Hood, J. Steven, 2019, *The Dragons Entagled : Indochina and China Vietnam War*, London and New York : routledge Publishing.
- Urban Sesame. 2022. “China Vs Vietnam : The somehow Both of Alive”, <https://urbansesame.com/community/china-vs-vietnam-notes-from-someone-who-lived-in-both/>
- Vietnam Briefing, (2024), “Vietnam Top Investors and FDI Beneficiaries January to November 2024”, <https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-top-investors-and-fdi-beneficiaries-january-to-november-2024.html/>
- Vietnam Law and Legal forum, (2024), “Ensuring Optimal Conditions For National Development : Party General Secretary, State President To Lam”, <https://vietnamlawmagazine.vn/ensuring-optimal-conditions-for-national-development-party-general-secretary-state-president-to-lam-72296.html>

- Vietnam News, (2021), “Sustainable Peace Secured Only When the Consequences of Wars and Conflict Resolved : Foreign Minister”, <https://vietnamnews.vn/politics-laws/922107/sustainable-peace-secured-only-when-the-consequences-of-wars-and-conflicts-resolved-foreign-minister.html>
- Vietnam News, (2024), “EU Eyes Comprehensive Strategic Partnership With Vietnam”, <https://vietnamnews.vn/politics-laws/1715923/eu-eyes-comprehensive-strategic-partnership-with-viet-nam.html>
- Vietnam Law Magazine, 2023, “Completing Legal System on National Defense and Security for the Socialist Law Rule State”, <https://vietnamlawmagazine.vn/completing-the-legal-system-on-national-defense-and-security-for-the-socialist-law-ruled-state-70512.html>
- Vietnam Plus, (2024), “Vietnam-China Strengthen Defence Cooperations”, <https://en.vietnamplus.vn/vietnam-china-strengthen-defence-cooperation-post300873.vnp>
- Vietnam Plus, (2024), “Vietnam, China Sign 36 Cooperation Document”, <https://en.vietnamplus.vn/vietnam-china-sign-36-cooperation-documents-post274790.vnp>
- VoA Indonesia, (2024), “Menhan Jepang Bertemu Mitranya dan PM Vietnam di Hanoi”, <https://www.voaindonesia.com/a/menhan-jepang-bertemu-mitranya-dan-pm-vietnam-di-hanoi/7731855.html>
- U.S. Embassy Hanoi. (2023). *Joint Leaders’ Statement Elevating U.S.-Vietnam Relations to a Comprehensive Strategic Partnership*. <https://vn.usembassy.gov>
- Fulcrum. (2023). *Vietnam-U.S. Security Cooperation Prospects Under the Comprehensive Strategic Partnership*. <https://fulcrum.sg>
- U.S. Department of Defense. (2024). *U.S.-Vietnam Deepening Defense Cooperation*. <https://www.defense.gov>
- Council on Foreign Relations (CFR). (2020). *Vietnam’s Response to the U.S. Changing Approach to the South China Sea*. <https://www.cfr.org>